

# Laporan Kinerja 2023

DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN  
INFORMASI STATISTIK



**BADAN PUSAT STATISTIK**



# Laporan Kinerja 2023

**DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN  
INFORMASI STATISTIK**



**BADAN PUSAT STATISTIK**

# Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2023

**No. Publikasi:** 03100.24002

**Katalog:** 1202063

**Ukuran Buku:** 21 x 29,7 cm

**Jumlah Halaman:** xx+68 halaman

**Naskah:**

Tim Penyusun SAKIP Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

**Penyunting:**

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

**Desain Kover:**

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

**Penerbit:**

© Badan Pusat Statistik

**Pencetak:**

Badan Pusat Statistik

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

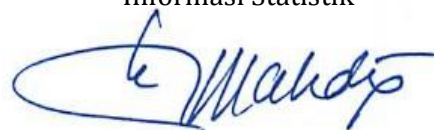
# Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LAKIN) Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy selama Tahun 2023 kepada Kepala Badan Pusat Statistik. LAKIN ini disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan keseluruhan prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

Pelaporan akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan di Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Laporan ini juga memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, yakni melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan laporan pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi BPS dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2023 dan memberikan rekomendasi pada tahun 2024.

Jakarta, Januari 2024  
Deputy Bidang Metodologi dan  
Informasi Statistik



Dr. Eng. Imam Machdi M.T.



# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xiii
Ringkasan Eksekutif.....	xv
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi.....	4
1.3. Sumber Daya Manusia.....	4
1.4. Potensi dan Permasalahan.....	5
1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2023.....	6
Bab 2. Perencanaan Kinerja.....	9
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
2.2. Rencana Strategis 2020–2024.....	12
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
Bab 3. Akuntabilitas Kinerja.....	15
3.1. Analisis Capaian Kinerja.....	17
3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023.....	17
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2020-2023.....	27
3.1.3. Analisis Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) Tahun 2023.....	28
3.1.4. Analisis Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik (DDS) Tahun 2023.....	29
3.1.5. Analisis Capaian Kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) Tahun 2023.....	33

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja.....	35
3.2. Prestasi dan inovasi Deputi MIS tahun 2023.....	43
3.3. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023.....	45
3.3.1. Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Sasaran .....	45
3.3.2. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran .....	48
3.3.3. Upaya Efisiensi Anggaran .....	53
Bab 4. Penutup .....	55
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	57
Lampiran .....	61



# Daftar Tabel

Tabel 1.	Rencana Strategis (Renstra) Reviu Deputi Bidang MIS 2020–2024.....	12
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang MIS, 2023 .....	13
Tabel 3.	Realisasi dan Capaian Kinerja Deputi Bidang MIS Tahun 2023 .....	17
Tabel 4.	Daftar Nama Survei Yang Telah Diselesaikan Penyusunan Desain Sampling dan Pengukuran Sampel Tahun 2023 .....	20
Tabel 5.	Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Menurut Program Tahun 2023 .....	45
Tabel 6.	Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Diseminasi Statistik Menurut Sumber Anggaran Tahun 2023.....	46
Tabel 7.	Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Diseminasi Statistik Menurut Sasaran Tahun 2023 .....	47
Tabel 8.	Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Sistem Informasi Statistik Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2023 .....	47
Tabel 9.	Efisiensi Anggaran Tahun 2023 .....	54



# Daftar Gambar

Gambar 1. Komposisi SDM Deputi Bidang MIS Menurut Tingkat Pendidikan, 2023.....	5
Gambar 2. Grafik Capaian Kinerja Deputi Bidang MIS Tahun 2020-2023 .....	27
Gambar 3. Sertifikasi ISO 27001:2022 .....	43



# Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Struktur Organisasi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik .....	63
Lampiran 2.	Penetapan Kinerja Tahunan Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik, 2023 .....	64
Lampiran 3.	Capaian Kinerja Tahunan Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik, 2023 .....	66
Lampiran 4.	Capaian Kinerja Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik Tahun 2020-2023.....	67
Lampiran 5.	Jumlah Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik Menurut Info Kerja Dan Jenjang Pendidikan, 2023 .....	68



# Ringkasan Eksekutif

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

Visi Deputi Bidang MIS yaitu “Penyedia Metodologi dan Informasi Statistik berkualitas untuk Mendukung Indonesia Maju” untuk mendukung visi BPS “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Selanjutnya, penjabaran misi yang menerjemahkan visi tersebut di atas mencakup: 1). Mengembangkan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas, baik segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI); 2). Membina K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik; dan 3). Meningkatkan layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional.

Pelaksanaan misi Deputi Bidang MIS bertujuan agar tersedianya metodologi dan sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas, meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik, serta meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN). Sasaran yang ingin dicapai dengan pelaksanaan misi di atas adalah:

- a. Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas.
- b. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, Sistem Terintegrasi dan Jaringan komunikasi yang andal.
- c. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).
- d. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2023 Deputi Bidang MIS melaksanakan berbagai kegiatan yang mengacu pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 101,76 persen.

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan nilai sebesar Rp37.760.607.000,00 realisasinya mencapai Rp36.682.991.642,00 (97,15%). Apabila ditambahkan dengan yang berasal dari PNBPN,

nilai anggaran sebesar Rp45.665.595.000,00 dan realisasinya mencapai Rp40.362.575.720,00 atau sebesar 88,39 persen. Sedangkan Pelaksanaan program Deputi Bidang MIS tersebut terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan ketidاكلancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi.

Secara umum hambatan yang dihadapi Direktorat di bawah Deputi Bidang MIS disebabkan oleh:

#### **A. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei**

- a. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas pegawai di bidang metodologi sensus dan survei yang disebabkan adanya tanggung jawab pekerjaan yang padat pada jam kerja. Terbatasnya sarana (laptop, koneksi internet, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia).
- b. Peningkatan kebutuhan pengembangan metodologi integrasi data, sumber data dan permintaan data SBR sehingga dibutuhkan payung hukum terkait peraturan petunjuk teknis statistik ekonomi terintegrasi.
- c. Kendala pemutakhiran wilayah kerja statistik seperti keterlambatan pengiriman peta dari daerah, permasalahan batas antar provinsi, pemekaran wilayah, serta kendala teknis terkait pengolahan peta dan titik bangunan.
- d. Keterlambatan pengolahan data, keterbatasan akses data, dan perubahan proses bisnis pada waktu menjelang kegiatan menghambat dalam penyusunan metodologi dan daftar sampel.
- e. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan di bidang statistik sektoral belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan statistik sektoral.

#### **B. Direktorat Diseminasi Statistik**

- a. Percepatan penyediaan data yang disajikan pada publikasi Statistik Indonesia (SI) serta publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) yang dirilis oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan belum optimalnya koordinasi dan komitmen dari berbagai pihak yang tersebar di beberapa unit kerja dan direktorat berbeda selaku *subject matter* (penanggung jawab data) dengan Kementerian/Lembaga selaku produsen data sektoral, sehingga berpengaruh pada kelengkapan data yang tersedia di SIMDASI.
- b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan *stakeholder* terkait standar pelayanan tentang prosedur pengajuan permintaan layanan online melalui [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id).
- c. Kurang maksimalnya interoperabilitas data dari sisi kuantitas dan kualitas metadata indikator dan variabel untuk mendukung diseminasi data statistik di website.
- d. Tingkat kepatuhan K/L/I/D terhadap kewajiban pemberitahuan rancangan kegiatan statistik secara aktif dan mandiri ke BPS masih rendah.
- e. Terbatasnya alokasi anggaran APBN untuk pembinaan statistik sektoral memberi ruang gerak yang sangat terbatas untuk melakukan proses pembinaan menyeluruh dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
- f. Kendala teknis pada saat implementasi aplikasi pengelolaan metadata statistik yang baru yaitu aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Indonesia Data Hub (INDAH).



### C. Direktorat Sistem Informasi Statistik

- a. Tata Kelola TI di lingkungan BPS dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan aset TIK belum optimal.
- b. Tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM TI dalam hal *database*, perangkat lunak, perangkat keras, serta pengetahuan umum TI lainnya masih tidak merata.
- c. Permintaan layanan TI berbagai kegiatan sensus dan survei yang tidak terkoordinir dengan baik menyebabkan penumpukan beban kerja di satu waktu sehingga dapat mengurangi kualitas layanan TI.
- d. Kegiatan pengembangan TI BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir membutuhkan waktu dalam pembahasan dan persetujuan melalui proses *clearance* oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga perlu dilakukan penjadwalan ulang dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Selain itu juga dibutuhkan waktu untuk migrasi ke Pusat Data Nasional (PDN).
- e. Infrastruktur TI yang mendukung tersedianya layanan TI mencakup *server*, *storage* dan perangkat jaringan di *data center* BPS sebagian besar sudah uzur dimana masa pemakaian perangkat sudah melebihi 5 tahun. Selain itu sebagian besar perangkat juga telah memasuki masa *end of support*. Jika tidak dilakukan peremajaan perangkat, maka dikhawatirkan dukungan terhadap layanan TI tidak akan berjalan maksimal.

Tindak lanjut yang dilakukan Deputy Bidang MIS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu:

#### A. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

- a. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai media dan metode pembelajaran, misalnya secara *online*, forum diskusi, *knowledge sharing* antar-pegawai di dalam unit kerja serta mengoptimalkan pengaturan beban tugas yang seimbang dari segi volume, waktu, kemampuan SDM, dan jumlah SDM.
- b. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait di internal BPS dan peningkatan manajemen/tata kelola kegiatan dalam pelaksanaan desain sensus dan survei serta pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi, agar keseimbangan antara beban tugas, waktu, dan sumber daya yang tersedia tetap terjaga, dan tujuan tercapai.
- c. Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini secara optimal sangat dibutuhkan terutama teknologi *Geographical Information System* (GIS) dan *Remote Sensing* (RS) untuk kegiatan pengembangan kerangka sampel, kerangka geospasial tutupan lahan pertanian, *updating*, dan pengumpulan data kegiatan sensus dan survei. Pengembangan sistem aplikasi berbasis GIS juga perlu ditingkatkan untuk memudahkan proses pengumpulan data lapangan dan pengerjaan peta digital agar lebih efisien, akurat, dan tepat guna.
- d. Penguatan statistik sektoral khususnya terkait pembinaan dan sosialisasi Satu Data Indonesia baru bisa dilakukan sampai ke daerah di tahun berikutnya.

- e. Implementasikan manajemen perubahan dan manajemen risiko diterapkan sejalan dengan usaha peningkatan nilai SPIP secara lebih detail.

## **B. Direktorat Diseminasi Statistik**

- a. Melaksanakan evaluasi, mempertajam pembagian tugas dan identifikasi kegiatan saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) sehingga lebih meningkatkan koordinasi dan komitmen dari semua pihak (*subject matter* dan Kementerian/Lembaga) dalam rangka percepatan penyediaan data pada SIMDASI untuk keperluan rilis publikasi Statistik Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA) tahun berikutnya.
- b. Melaksanakan sosialisasi standar pelayanan tentang prosedur pengajuan permintaan layanan kepada masyarakat dan *stakeholder* dan layanan nol rupiah kepada *Subject Matter* di internal BPS dan Kementerian/Lembaga.
- c. Menyelenggarakan pelayanan prima secara konsisten dan berkelanjutan melalui pengelolaan produk statistik, layanan produk statistik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.
- d. Mengembangkan dan memelihara sistem layanan pelayanan publik.
- e. Berinovasi dalam meningkatkan kemudahan persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur/alur pelayanan, kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan, kesesuaian biaya pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, kenyamanan sarana dan prasarana, kemudahan akses data BPS, respon petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, keberadaan fasilitas pengaduan, dan proses penanganan pengaduan.
- f. Penguatan SDM internal BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik untuk mendorong pengajuan rekomendasi kegiatan statistik.
- g. Meningkatkan kolaborasi dan memaksimalkan sarana dalam proses penyelenggaraan pembinaan statistik ke K/L/D/I agar menumbuhkan kesadaran akan kewajiban K/L/D/I dalam pengajuan rekomendasi kegiatan statistik.
- h. Penguatan Implementasi Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik dan melaksanakan sosialisasi serta pendampingan dalam penyusunan metadata sektoral dan khusus.
- i. Meningkatkan kolaborasi Direktorat Diseminasi Statistik dengan *Subject Matter* BPS sebagai pembina data statistik dalam melakukan pembinaan statistik sektoral.
- j. Melakukan optimalisasi strategi promosi digital melalui berbagai akun media sosial resmi BPS sebagai solusi promosi statistik di era digital.
- k. Melakukan pembinaan terhadap SDM, baik dari pihak BPS daerah maupun universitas, dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan statistik pada akademisi melalui kegiatan Pojok Statistik di seluruh Indonesia.

## **C. Direktorat Sistem Informasi Statistik**

- a. Meningkatkan tata kelola dan tata laksana TI untuk mendukung kegiatan operasional statistik.

- b. Meningkatkan tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM di bidang TI, secara bertahap dengan menyertakan SDM mengikuti pelatihan-pelatihan dan kegiatan *capacity building* lainnya.
- c. HaloSIS sebagai aplikasi pemenuhan layanan TI telah dikembangkan dan dikaji layanannya mengikuti *framework Information Technology Service Management (ITSM)* seperti manajemen aset, manajemen proyek dan lain-lain. Namun, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses *assignment* tiket maka perlu adanya *knowledge transfer* terkait katalog layanan yang terdapat dalam layanan TI BPS kepada pengguna layanan maupun petugas *service desk*.
- d. Di Awal tahun 2024 akan terjadi perubahan Tim Manajemen Layanan TI, sehingga perlu dilakukan *knowledge transfer* kepada tim kerja Manajemen Layanan TI baru agar kualitas dan layanan TI dapat tetap terjaga dan meningkat sesuai target Indeks Kepuasan Layanan TI 2024.
- e. Dalam rangka pertukaran data ekspor-impor dengan Dirjen Bea & Cukai, perlu dilakukan *reengineering* sistem pengolahan data ekspor-impor untuk mengintegrasikan proses-proses penarikan data yang masih dilakukan di luar sistem, sekaligus untuk mengakomodir kebutuhan penarikan data ekspor impor yang semakin besar (bersifat harian).
- f. Sosialisasi pengukuran keselarasan srategi bisnis dan TI pada unit kerja lain.
- g. Memperkuat integrasi antar sistem dan menyusun mekanisme pemantauannya. Mengingat kegiatan pengembangan TI BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir membutuhkan integrasi yang baik antar sistem dan pemantauan secara ketat. Ketika ada sistem tertentu yang mengalami kendala, maka akan berpengaruh ke sistem yang lain.
- h. Percepatan pengembangan SISNAS dan proses migrasi ke PDN.
- i. Peremajaan infrastruktur TI yang telah memasuki masa *end of support* (*server, storage, perangkat jaringan, dan lainnya*) sehingga dapat menjamin keberlangsungan pemberian layanan TI kepada pengguna.

Capaian kinerja Deputy Bidang MIS menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Deputy Bidang MIS sudah sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi Deputy Bidang MIS.





1

# Pendahuluan



## 1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada publik baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan. Kinerja BPS dalam melaksanakan UU No. 16 tahun 1997 diukur melalui pencapaian kinerja indikator-indikator sasaran yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja. Pada dasarnya Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Untuk menciptakan akuntabilitas kinerja birokrasi secara berkesinambungan, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem ini merupakan suatu instrumen yang mengukur transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang MIS sebagai penyelenggara negara. Laporan kinerja ini disusun dengan merujuk pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Laporan ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja di lingkungan Deputy Bidang MIS sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Di dalam laporan kinerja Deputy Bidang MIS Tahun 2023 tertuang hasil capaian kinerja selama tahun 2023. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Deputy Bidang MIS tahun 2023 juga merupakan perwujudan kewajiban Deputy Bidang MIS untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2023 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Deputy Bidang MIS di tahun yang akan datang.

## 1.2. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Deputy Bidang MIS berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

### 1. Tugas

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pusat Statistik, tugas Deputy Bidang MIS mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

### 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputy Bidang MIS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik,
- b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik,
- c. Pelaksanaan pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik, dan
- d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

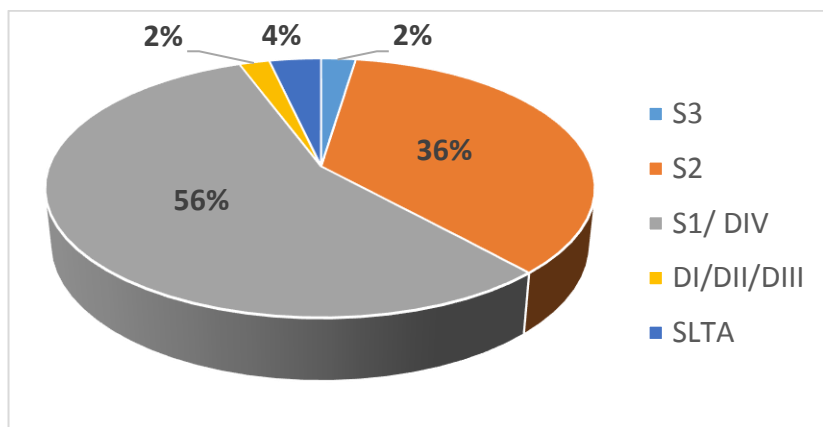
### 3. Susunan Organisasi

Deputy Bidang MIS terdiri dari tiga unit kerja eselon II, yaitu Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS), Direktorat Diseminasi Statistik (DDS), dan Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS).

## 1.3. Sumber Daya Manusia

Pada akhir tahun 2023, SDM Deputy Bidang MIS seluruhnya berjumlah 337 pegawai. Kualitas SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Komposisi SDM terbesar dengan tingkat pendidikan D-IV/ S1, yaitu mencapai 56 persen. Sedangkan SDM dengan tingkat pendidikan S2 dan S3 sebesar 38 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM Deputy Bidang MIS sangat baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.





**Gambar 1. Komposisi SDM Deputy Bidang MIS Menurut Tingkat Pendidikan, 2023**

#### 1.4. Potensi dan Permasalahan

Dalam perjalanannya mengemban tugas sesuai amanat Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Deputy Bidang MIS berupaya memenuhi kebutuhan *stakeholder* dalam rangka penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan sektoral oleh internal maupun eksternal BPS. Dukungan metodologi, pengolahan data, infrastruktur TI, dan diseminasi statistik yang optimal sangat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan statistik. Potensi yang dimiliki Deputy Bidang MIS untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan antara lain:

1. Dukungan sumber daya berkualitas yang dapat dioptimalkan untuk mencapai visi dan misi Deputy Bidang MIS. Sebagian besar SDM di Deputy Bidang MIS adalah pegawai berpendidikan tinggi yang didukung oleh sarana dan prasarana TI yang cukup memadai untuk digunakan dalam pengembangan sistem dan aplikasi.
2. Peningkatan kepercayaan publik kepada BPS khususnya Deputy Bidang MIS. Hal tersebut terlihat dari peningkatan permintaan pembinaan dan kerjasama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei.
3. Berkembangnya teknologi informasi berbasis geospasial membuka potensi yang besar dalam pengembangan metodologi sensus dan survei. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi dan Promosi Statistik.
4. Peningkatkan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus.
5. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).
6. Peningkatan Kualitas Layanan Publikasi dan Kompilasi Statistik.
7. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi dan Promosi Statistik.
8. Perwujudan Layanan Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik yang Prima.

Dalam pelaksanaan program Deputy Bidang MIS terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi. Secara umum hambatan tersebut disebabkan oleh:

1. Keterbatasan SDM yang dimiliki
  - a. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas pegawai di bidang metodologi sensus dan survei yang disebabkan adanya tanggung jawab pekerjaan yang padat pada jam kerja.
  - b. Tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM TI dalam hal *database*, perangkat lunak, perangkat keras, serta pengetahuan umum TI lainnya masih tidak merata.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana:
  - a. Kegiatan pengembangan TI BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir membutuhkan waktu dalam pembahasan dan persetujuan melalui proses *clearance* oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga perlu dilakukan penjadwalan ulang dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Selain itu juga dibutuhkan waktu untuk migrasi ke Pusat Data Nasional (PDN).
  - b. Infrastruktur TI yang mendukung tersedianya layanan TI mencakup *server*, *storage* dan perangkat jaringan di *data center* BPS sebagian besar sudah uzur dimana masa pemakaian perangkat sudah melebihi 5 tahun. Selain itu sebagian besar perangkat juga telah memasuki masa *end of support*. Jika tidak dilakukan peremajaan perangkat, maka dikhawatirkan dukungan terhadap layanan TI tidak akan berjalan maksimal.
  - c. Tata Kelola TI di lingkungan BPS dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan aset TIK belum optimal.
  - d. Terbatasnya sarana (laptop, koneksi internet, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia).
3. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan di bidang statistik sektoral belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan statistik sektoral.
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan *stakeholder* terkait standar pelayanan tentang prosedur pengajuan permintaan layanan online melalui [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id).
5. Kurang maksimalnya interoperabilitas data dari sisi kuantitas dan kualitas metadata indikator dan variabel untuk mendukung diseminasi data statistik di *website*.
6. Tingkat kepatuhan K/L/I/D terhadap kewajiban pemberitahuan rancangan kegiatan statistik secara aktif dan mandiri ke BPS masih rendah.
7. Terbatasnya alokasi anggaran APBN untuk pembinaan statistik sektoral memberi ruang gerak yang sangat terbatas untuk melakukan proses pembinaan menyeluruh dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
8. Permintaan layanan TI berbagai kegiatan sensus dan survei yang tidak terkoordinir dengan baik menyebabkan penumpukan beban kerja di satu waktu sehingga dapat mengurangi kualitas layanan TI.

## 1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2023

Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Badan Pusat Statistik, Laporan Kinerja Deputi Bidang MIS Tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia; potensi dan permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang MIS; serta sistematika penyajian laporan.
- BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang MIS Tahun 2023.
- BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Realisasi dan capaian kinerja tahun 2023; Perbandingan capaian kinerja total tahun 2023 sampai dengan 2020; Realisasi kinerja per IKU dari tahun 2023 sampai dengan tahun pertama periode Renstra; Realisasi kinerja per IKU tahun 2023 terhadap target Renstra tahun 2023; Perbandingan realisasi kinerja per IKU tahun 2023 terhadap target akhir Renstra; Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja; Prestasi dan Inovasi Satker Tahun 2023; dan Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023.
- BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.





2

# Perencanaan Kinerja



## 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPS No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024 menyatakan bahwa visi dari BPS untuk tahun 2020 – 2024 yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Untuk mendukung tercapainya visi BPS, maka Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik merumuskan visi Tahun 2020 – 2024, yaitu “Penyedia Metodologi dan Informasi Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”.

Rumusan visi tersebut merupakan komitmen bersama, mengingat besar dan kompleksnya permasalahan pembangunan statistik yang maju dan mampu menghasilkan *official statistics* yang dibutuhkan masyarakat dan dapat dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh *National Statistics Office* (NSO) negara lain. Sehingga, di masa mendatang BPS dapat menjadi rujukan perstatistikan di dunia internasional.

Perlu juga digarisbawahi pencapaian visi memerlukan kecermatan dan kematangan dalam perencanaan program dan kegiatan tahunan yang fokus pada skala prioritas tujuan organisasi yang harus dicapai. Sehingga, pengukuran kinerja pun harus dapat ditentukan secara tepat agar dapat menjadi evaluasi pencapaian target kinerja.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Deputi Bidang MIS yang menggambarkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan demi pencapaian visi. Misi dari Deputi Bidang MIS tahun 2020–2024 dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas, baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI)
2. Membina K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik
3. Meningkatkan layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional.

Tujuan Deputi Bidang MIS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020–2024 adalah:

1. Tersedianya metodologi dan sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas;
2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik;
3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN).

Dari tujuan yang ditetapkan dapat diturunkan menjadi sasaran strategis Deputi Bidang MIS guna mencapai tujuannya. Berikut sasaran strategis pada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

1. Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas, dengan Indikator Kinerja Utama adalah persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas.

2. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, Sistem Terintegrasi dan Jaringan komunikasi yang andal, dengan Indikator Kinerja Utama adalah Indeks Kepuasan Layanan TI.
3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), dengan Indikator Kinerja Utama adalah Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik.
4. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional, dengan Indikator Kinerja Utama adalah Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan.

## 2.2. Rencana Strategis 2020–2024

Sebagai dasar menyusun perencanaan kinerja tahunan agar pelaksanaan program dan kegiatan di BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, Deputy Bidang MIS mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020–2024 yang sudah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005–2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2020–2024, serta telah dilakukan reviu pada tahun 2022.

Untuk mencapai Visi Misi Deputy Bidang MIS telah menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Rencana Strategis (Renstra) Reviu Deputy Bidang MIS 2020–2024**

Tujuan		Sasaran Strategis	
(1)		(2)	
1.	Tersedianya Metodologi dan Sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas	1.1	Tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas
		1.2.	Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, Sistem Terintegrasi dan Jaringan komunikasi yang andal
2.	Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik	2.1.	Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
3.	Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)	3.1.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada Tabel 1 memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.



## 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Selama periode tahun 2023 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Deputi Bidang MIS yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Pada tahun 2023, dilakukan revaluasi Perjanjian Kinerja 2023 dengan mengubah target pada Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Pertama di Tujuan Kedua. Dimana, target meningkat dari 45 persen menjadi 100 persen.

Pada subbab ini ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang MIS. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target.

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang MIS, 2023**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. Tersedianya Metodologi dan Sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas</b>			
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persen	100
Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, sistem terintegrasi, dan jaringan komunikasi yang andal.	Indeks Kepuasan Layanan TI	Indeks	95
<b>2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik</b>			
Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	100
<b>3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)</b>			
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Indeks	83





3

# Akuntabilitas Kinerja



### 3.1. Analisis Capaian Kinerja

#### 3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja Deputy Bidang MIS tahun 2023 didasarkan pada tujuan dan sasaran strategis yang diukur dari indikator utama Deputy Bidang MIS. Hal tersebut dirangkum dan dijabarkan dari penetapan kinerja seluruh Direktorat yang berada di bawahnya. Hasil penjabaran antara lain:

1. Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas,
2. Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran,
3. Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data,
4. Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas,
5. Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei,
6. Terwujudnya kerjasama kegiatan statistik dalam metodologi sensus dan survei,
7. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN,
8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN,
9. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal [*Customer Perspective*],
10. Tersedianya *platform data hub* yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) [*Stakeholder Satisfaction*],
11. Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam kerangka transformasi digital [*Internal Process*]

Pencapaian kinerja tersebut ditetapkan melalui tiga tujuan strategis, yaitu:

1. Tersedianya Metodologi dan Sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas,
2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik,
3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN),

Selama periode tahun 2023, Deputy Bidang MIS telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja ditandai dengan realisasi rata-rata hasil pencapaian kinerja sebesar 101,76 persen. Rincian capaian kinerja Deputy MIS dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Realisasi dan Capaian Kinerja Deputy Bidang MIS Tahun 2023**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Tersedianya Metodologi dan Sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas</b>					

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1. Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal. Efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00
1.2. Meningkatkan kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, sistem terintegrasi, dan jaringan komunikasi yang andal.	Indeks Kepuasan Layanan TI	Poin	95,00	95,06	100,06
<b>2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik</b>					
2.1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	100,00	100,00	100,00
<b>3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)</b>					
3.1. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Poin	83,00	88,78	106,96

**Tujuan 1: Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas**

**Sasaran 1.1: Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00

Keberhasilan Deputi Bidang MIS dalam mencapai indikator persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas tidak terlepas dari keterkaitan dengan indikator lain dan juga capaian dari direktorat di bawahnya, yaitu Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS). Selama tahun 2023, Direktorat PMSS berhasil menyelesaikan 49 dokumen desain sampling dan 64 dokumen pengukuran sampel. Semua dokumen yang diselesaikan mencakup desain sampling, termasuk alokasi sampel dan pengukuran sampel dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak luar Direktorat PMSS, baik dari internal BPS (Penanggung Jawab Kegiatan/PJK BPS) maupun dari eksternal BPS (Kementerian/ Lembaga di luar BPS). Dengan demikian, pencapaian indikator persentase jumlah dokumen desain sampling sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas pada tahun 2023 berhasil mencapai 100 persen.

Dokumen desain sensus dan survei merupakan naskah desain sensus maupun survei yang disiapkan untuk kegiatan sensus atau survei di bidang statistik sosial, bidang statistik produksi, bidang statistik distribusi dan jasa, serta bidang untuk mendukung perhitungan neraca nasional. Isi dalam dokumen desain ini mencakup namun tidak terbatas pada jumlah dan alokasi sampel, metode dan prosedur pengambilan sampel, prosedur penghitungan penimbang (sampling weight), prosedur penghitungan kesalahan sampling (sampling error), dan prosedur pengumpulan data. Sedangkan dokumen pengukuran sampel merupakan dokumen yang berisi hasil penghitungan minimum sampel sesuai dengan kesepakatan antara Direktorat PMSS dan Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) sensus atau survei terkait. Prosedur yang biasanya dilakukan dalam penghitungan sampel adalah Direktorat PMSS memberikan beberapa pilihan sampel sesuai dengan kebutuhan PJK, seperti level estimasi, cakupan kegiatan, dan informasi lainnya. Dari pilihan yang disediakan oleh Direktorat PMSS, PJK kemudian memilih salah satu opsi yang sesuai dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, seperti anggaran, kebutuhan dari pihak eksternal, dan lain-lain.

Capaian sebesar 100 persen pada indikator 1 dipengaruhi oleh realisasi capaian dokumen yang disediakan Direktorat PMSS melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023. Desain metodologi yang dihasilkan pada tahun 2023 sebanyak 49 dokumen dari target awal sebanyak 45 dokumen. Sedangkan, dokumen pengukuran sampel yang dihasilkan sebanyak 64 dokumen dari target awal 27 dokumen. Hal ini dikarenakan ada tambahan permintaan rancangan survei pada tahun berjalan baik yang berasal dari PJK BPS maupun kementerian/lembaga lain. Adapun permintaan desain sampling dari Kementerian/Lembaga lain merupakan bagian dari pembinaan dan kerjasama kegiatan statistik bidang metodologi sensus dan survei yang merupakan sasaran kinerja dari Direktorat PMSS. Kegiatan kerja sama pada umumnya menggunakan anggaran dari kementerian/lembaga yang bersangkutan dengan mekanisme kerjasama swakelola tipe I. Sebagai pembina statistik sektoral yang bertanggung jawab atas bidang metodologi sensus dan survei, hal ini merupakan salah satu kewajiban di Direktorat PMSS.

**Tabel 4. Daftar Nama Survei Yang Telah Diselesaikan Penyusunan Desain Sampling dan Pengukuran Sampel Tahun 2023**

Penyusunan Desain Sampling		Pengukuran Sampel	
No	Nama Survei	No	Nama Survei
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUB-KSA Bulan Maret-April (alokasi sampel)	1.	Survei Pertanian Tanaman Pangan/Survei Ubinan 2025
2.	SUB-KSA Bulan Mei-Juni (alokasi sampel)	2.	Survei Struktur Ongkos Usaha Hortikultura 2025 (SOUH)
3.	SUB-KSA Bulan Juli-Agustus (alokasi sampel)	3.	Survei Komoditas Strategis Perkebunan 2025 Komoditas Kelapa Sawit
4.	SUB-KSA Bulan September-Oktober (alokasi sampel)	4.	Survei Hortikultura Potensi 2025 (SHOPI)
5.	SUB-KSA Bulan November-Desember (alokasi sampel)	5.	Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA-Padi dan KSA-Jagung) 2025
6.	Survei Komstrat Perkebunan (Lada dan Kelapa) 2023	6.	Survei Perusahaan Perkebunan Bulanan (Sedapp Online) 2025
7.	Survei Ubinan Palawija 2023	7.	Survei Perusahaan Tahunan (SKB Tahunan) 2025
8.	Uji Coba Survei Produksi dan Lingkungan Pertanian 2023	8.	Updating DPP dan DUTL 2025
9.	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2023	9.	Pendataan Statistik Tanaman Bawang dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) 2025
10.	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Kabupaten Badung 2023 (Weighting)	10.	Survei Pertanian Hortikultura 2025
11.	Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (SPDT) IHPB 2023	11.	Survei Perusahaan Hortikultura 2025
12.	Survei Biaya Hidup Perkotaan dan Pedesaan 2022	12.	Pendataan Lengkap Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP TPI) 2025
13.	Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2023	13.	Pendataan Lengkap Pendaratan Ikan Tradisional (PIT) 2025
14.	Survei Komoditas Spesifik (SVK) 2023	14.	Pendataan Lengkap Perusahaan Budidaya Ikan (LTB) 2025
15.	Survei Tarif Sewa/Kontrak Rumah, Upah Asisten Rumah Tangga dan Upah Baby Sitter dan Uang Sekolah (STRABS) 2023	15.	Pendataan Lengkap Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP) 2025



Penyusunan Desain Sampling		Pengukuran Sampel	
No	Nama Survei	No	Nama Survei
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Survei Jasa Akomodasi Tahunan (VHTL) 2023	16.	Laporan Tahunan Perusahaan Sapi Perah (LTS) 2025
17.	Survei Daya Tarik Wisata (VDTW) 2023	17.	Laporan Tahunan Perusahaan Ternak Besar dan Kecil (LTT) 2025
18.	Survei Penyedia Makan/Minum (VREST UMB) 2023	18.	Laporan Tahunan Perusahaan Ternak Unggas (LTU) 2025
19.	Survei Karakteristik Usaha (BCS) 2023	19.	Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB) 2025
20.	Survei Statistik Keuangan Desa/Nagari (K3) 2023	20.	Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan (DKT) 2025
21.	Survei Ecommerce 2023	21.	Survei Perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar 2025
22.	SLK (Survei Koperasi Simpan Pinjam dan Valas) 2023	22.	Survei Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2025
23.	Passenger Exit Survey (PES) 2023	23.	Survei Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) 2025
24.	Survei Digital Wisatawan Nasional (Outbound) 2023	24.	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2025
25.	Survei Digital Wisatawan Nusantara 2023	25.	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2025
26.	Survei Perdagangan Antar Wilayah (PAW) 2023	26.	Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025
27.	Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan 2023	27.	Survei Nilai Tukar Petani (NTP) 2024
28.	Ujicoba Survei Integrasi Statistik Perdagangan Dalam Negeri 2023	28.	Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2025
29.	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi 2023	29.	Survei Harga Produsen Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan & Penggalan (HP) 2025
30.	Survei Profil Pasar 2023	30.	Survei Harga Produsen Sektor Jasa (HPJ) 2025
31.	Ujicoba Survei Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Jasa Lainnya 2023	31.	Survei Harga Produsen Sektor Pertanian (HPT) 2025
32.	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2023	32.	Survei Karakterik Usaha (BCS) 2023

Penyusunan Desain Sampling		Pengukuran Sampel	
No	Nama Survei	No	Nama Survei
(1)	(2)	(3)	(4)
33.	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023	33.	Survei Wisatawan Nasional 2023
34.	Survei Komuter 2023	34.	Passenger Exit Survey (PES) 2025
35.	Studi EA SLS Sakernas Agustus 2023	35.	Survei Digital Wisatawan Nusantara 2025
36.	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024	36.	Survei Digital Wisatawan Nasional 2025
37.	Survei IMK Triwulanan 2023	37.	Survei Karakterik Usaha (BCS) 2025
38.	Survei IMK Tahunan 2023	38.	Survei K3 2025
39.	Survei Konstruksi Tahunan 2022	39.	Survei Ecommerce 2025
40.	Survei Konstruksi triwulanan 2023	40.	Survei Koperasi Simpan Pinjam 2025
41.	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023	41.	Survei Lembaga Keuangan Pedagang Valuta Asing 2025
42.	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024	42.	Survei Penimbang Wisatawan Nusantara 2025
43.	Seruti 2023	43.	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi 2025
44.	NTA (National Transfer Account) 2023	44.	Survei Perdagangan Antar Wilayah (PAW) 2025
45.	PES ST2023	45.	Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan 2025
46.	SKTNP Barang 2024	46.	Survei Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan 2025
47.	SKTNP Jasa 2024	47.	Sakernas Februari 2025
48.	Survei Stok Beras Akhir Tahun 2023	48.	Sakernas Agustus 2025
49.	Survei Stok Jagung Akhir Tahun 2023	49.	Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2025
		50.	Survei Konstruksi Tahunan 2024 (pelaksanaan 2025)
		51.	Survei Konstruksi triwulanan 2025
		52.	Survei IMK Triwulanan 2025
		53.	Survei IMK Tahunan 2025

Penyusunan Desain Sampling		Pengukuran Sampel	
No	Nama Survei	No	Nama Survei
(1)	(2)	(3)	(4)
		54.	Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur 2025
		55.	Survei IBS Bulanan 2025
		56.	Survei Tahunan Usaha Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi (GALIAN-URT)
		57.	Survei Captive Power 2025
		58.	Susenas Maret 2025
		59.	Susenas September 2025
		60.	Seruti 2025
		61.	SKTNP Barang 2025
		62.	SKTNP Jasa 2025
		63.	SKNP 2025
		64.	SEEA 2025

#### **Kendala:**

1. Untuk Survei yang memerlukan perhitungan ulang minimum sampel, data populasi final yang bersumber dari data PJK telat didapat sehingga penghitungan minimum sampel dilakukan secara berulang dan belum adanya format standar data populasi dari PJK.
2. Terdapat SOP dari desain yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal pada saat pelaksanaan lapangan dan terdapat kendala dalam implementasi beban kerja petugas lapangan.
3. Pada perhitungan minimum sampel dan alokasi sampel, terdapat perubahan cakupan yang disampaikan oleh PJK BPS karena adanya keterbatasan atau perubahan anggaran.
4. Terbatasnya akses data pada hasil pendataan lengkap/Sensus sehingga membatasi pegawai untuk melakukan eksplorasi data terkait penyusunan desain survei.
5. Terbatasnya sarana (laptop, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia).
6. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai di bidang metodologi sensus dan survei yang disebabkan adanya tanggung jawab pekerjaan yang padat pada jam kerja.

### Strategi untuk mengatasi kendala:

1. Melakukan komunikasi dengan PJK terkait percepatan penyampaian data serta membuat *template* untuk raw data di kegiatan selanjutnya supaya kegiatan perhitungan minimum sampel dapat dilakukan dengan lebih cepat.
2. Melakukan penyesuaian SOP lapangan dalam implementasi desain metodologi dan melakukan penyesuaian beban petugas sesuai dengan kendala yang dialami di lapangan dengan menyertakan berita acara sebagai laporan hasil penyesuaian sop dan beban petugas.
3. Melakukan komunikasi dengan PJK terkait keterbatasan anggaran dan menyampaikan perlunya beragam pilihan cakupan yang disiapkan oleh PJK untuk kemudian dilakukan perhitungan ulang minimum sampel dengan beragam pilihan oleh Tim PMSS.
4. Melakukan koordinasi dengan Direktorat SIS untuk memenuhi kebutuhan dan pelaksanaan eksplorasi desain survei serta menyiapkan kode program (*syntax*) terkait eksplorasi untuk dijalankan oleh Direktorat SIS yang memiliki akses.
5. Adanya keterbatasan sarana memaksa pegawai menggunakan laptop pribadi untuk pengayaan di bidang desain sensus dan survei.
6. Pengaturan pembagian tugas kepada SDM disesuaikan dengan beban dan kemampuannya SDM, serta tenggat waktu yang ditentukan.
7. Pengayaan dan peningkatan kapasitas SDM dilakukan secara *learning by doing* dan juga di luar jam kerja.

### Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, sistem terintegrasi, dan jaringan komunikasi yang andal

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Kepuasan Layanan TI	Poin	95,00	95,06	100,06

Indeks kepuasan layanan TI dihitung untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna dalam memanfaatkan layanan TI. Pada tahun 2023, indeks kepuasan diukur pada seluruh layanan TI yang disediakan Direktorat Sistem Informasi Statistik untuk pengguna melalui portal layanan TI (*halosis.bps.go.id*). Dari target indeks kepuasan layanan TI sebesar 95 poin, realisasi yang berhasil dicapai adalah sedikit melebihi target, sebesar 95,06 poin. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah 100,06%.

Secara garis besar tidak ada kendala yang berarti dalam kegiatan layanan TI. Namun masih ada pengguna yang memberikan nilai 1 pada survei kepuasan pengguna layanan TI. Alasan pengguna tersebut karena dirinya tidak mendapatkan solusi atas keluhan yang dialami, tetapi setelah dilakukan penelusuran ternyata terjadi kesalahan memasukan sub kategori dalam pembuatan tiket sehingga tiket tidak sampai kepada *technical support*.

## Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik

### Sasaran 2.1: Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	100,00	100,00	100,00

Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik merupakan indikator kinerja utama dari tujuan strategis kedua. Pada kegiatan pembinaan statistik sektoral, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik melalui Direktorat Diseminasi Statistik menargetkan ada sebanyak 100,00 persen. Pada tahun 2023 telah dilakukan pembinaan sebanyak 37 K/L/D/I dari 37 K/L/D/I yang masuk dalam populasi target pembinaan, atau dengan kata lain realisasi telah mencapai target sebesar 100,00 persen. Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah komitmen dan usaha optimal dari Direktorat Diseminasi Statistik dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik terhadap K/L/D/I.

#### Kendala:

Meskipun capaian indikator ini sudah memenuhi target, tetapi masih ada kendala yang dihadapi, yakni terbatasnya alokasi anggaran APBN untuk pembinaan statistik sektoral memberi ruang gerak yang sangat terbatas untuk melakukan proses pembinaan menyeluruh dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

#### Solusi:

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya atau solusi sebagai berikut:

1. Mengundang para K/L/D/I untuk mengikuti pembinaan melalui baik secara *luring* maupun *daring*.
2. Kolaborasi dengan *Subject Matter* internal BPS baik Pusat maupun Daerah dalam melakukan proses pembinaan.
3. Memaksimalkan sarana pertemuan secara daring dalam proses pembinaan statistik sektoral.

#### Rencana Tindak Lanjut:

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan Direktorat Diseminasi Statistik agar capaian kinerja indikator ini dapat meningkat di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan SDM internal BPS sebagai pembina data dalam melakukan pembinaan statistik.
2. Optimalisasi setiap pertemuan/koordinasi *Subject Matter* internal BPS dengan K/L/D/I untuk meningkatkan pembinaan statistik ke K/L/D/I.

3. Penguatan Implementasi Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

**Tujuan 3: Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)**

**Sasaran 3.1: Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Poin	83,00	88,78	106,96

Target dari indikator kinerja utama yang keempat pada tahun 2023 yaitu sebesar 83,00 persen. Target Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan tersebut juga telah dilampaui, karena realisasi mencapai 88,78 persen (kategori baik). Nilai capaian indikator ini diperoleh dari kegiatan Survei Kebutuhan Data BPS 2023. Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah komitmen dan pelayanan optimal dari pegawai terhadap konsumen data.

Nilai IKK ini menunjukkan bahwa kualitas layanan PST BPS Pusat termasuk dalam kategori Sangat Baik. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dikarenakan Direktorat Diseminasi Statistik menerapkan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik, mensosialisasikan standar pelayanan, melaksanakan monitoring dan evaluasi atas standar pelayanan tersebut secara rutin dan melibatkan masyarakat dan stakeholder untuk meningkatkan kemudahan akses permintaan layanan dan mempercepat pemenuhan permintaan layanan.

Dalam menyelenggarakan PST BPS Pusat, Direktorat Diseminasi Statistik telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada 5 (lima) jenis layanan yaitu Layanan Perpustakaan Online, Penjualan Publikasi Online, Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) Online, Konsultasi Statistik Online, serta Rekomendasi Kegiatan Statistik Online. Berdasarkan penghitungan nilai IKK menurut jenis layanan online, diperoleh nilai IKK dengan kategori Sangat Baik pada Layanan Perpustakaan Online, Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilkerstat Online, dan Konsultasi Statistik Online. Sementara itu, untuk layanan Penjualan Publikasi Online dan Rekomendasi Kegiatan Statistik Online memiliki nilai IKK dengan kategori Baik. Meskipun belum semua layanan online di PST BPS Pusat memiliki nilai IKK dengan kategori Sangat Baik, sasaran mutu ISO 9001:2015 Tahun 2022 telah terpenuhi bahkan telah melebihi target yaitu di atas 80.

Meskipun capaian indikator ini sudah memenuhi target, tetapi masih ada kendala yang dihadapi, antara lain masih kurangnya pemahaman masyarakat dan *stakeholder* terkait standar pelayanan tentang prosedur pengajuan permintaan layanan online melalui [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id), serta kurang maksimalnya interoperabilitas data dari sisi kuantitas dan kualitas metadata indikator dan variabel untuk mendukung diseminasi data statistik di

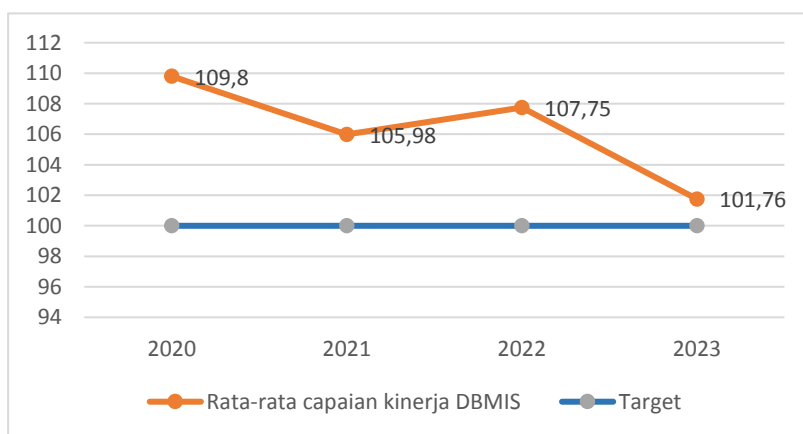
website. Solusi yang telah dilaksanakan atas kendala diatas adalah melakukan sosialisasi standar pelayanan tentang prosedur pengajuan permintaan layanan kepada masyarakat dan stakeholder, serta memperkaya konten data dan informasi yang disajikan melalui website BPS yang dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat dan *stakeholder*. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan Direktorat Diseminasi Statistik agar capaian kinerja indikator ini dapat meningkat di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sosialisasi standar pelayanan tentang prosedur pengajuan permintaan layanan kepada masyarakat dan *stakeholder*.
- b. Mengembangkan dan memelihara sistem layanan pelayanan publik.
- c. Berinovasi dalam meningkatkan kemudahan persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur/alur pelayanan, kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan, kesesuaian biaya pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, kenyamanan sarana dan prasarana, kemudahan akses data BPS, respon petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, keberadaan fasilitas pengaduan, dan proses penanganan pengaduan.

### 3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2020-2023

Selama jangka waktu 2020-2023 terdapat perubahan jumlah indikator. Pada 2020 terdapat 5 indikator, 2021 hingga 2023 terdapat 4 indikator. Selanjutnya juga terdapat perubahan target indikator kinerja. Hal ini dikarenakan adanya hasil rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penilaian SAKIP BPS.

**Gambar 2. Grafik Capaian Kinerja Deputi Bidang MIS Tahun 2020-2023**



Dari hasil penghitungan capaian kinerja dalam rentang waktu 2020-2023 sama-sama menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kinerja yang dicapai selalu melebihi target yang ditetapkan di awal tahun. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2023 sampai dengan 2020 secara detail terlampir pada Lampiran 4.

Selanjutnya dijelaskan perbandingan capaian kinerja dengan periode-periode sebelumnya, menurut target awal Renstra dan target akhir Renstra untuk masing-masing direktorat.

### 3.1.3. Analisis Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) Tahun 2023

#### A. Realisasi kinerja per IKU dari tahun 2023 sampai dengan tahun pertama periode Renstra

Capaian kinerja Deputi Bidang MIS terhadap target Renstra dari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jika dilihat capaian 2023 dibandingkan dengan target Renstra, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100 persen. Berdasarkan metadata indikatornya, hal ini menunjukkan bahwa seluruh permintaan penyusunan metodologi baik dari Penanggungjawab Kegiatan (PJK) BPS maupun pihak eksternal dapat diselesaikan seluruhnya.

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1 : Tersedianya Metodologi dan Sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas					
01 Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	2020*	100,00	131,24	131,24
		2021	100,00	100,00	100,00
		2022	100,00	100,00	100,00
		2023	100,00	100,00	100,00

\*) Formula penghitungan realisasi belum sesuai dengan metadata

#### B. Realisasi kinerja per IKU tahun 2023 terhadap target Renstra tahun 2023

Capaian kinerja Deputi Bidang MIS terhadap target Renstra Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Capaian 2023 jika dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100 persen. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 ini juga sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 1 : Tersedianya Metodologi dan Sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas.				



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	100,00	100,00	100,00

### C. Perbandingan realisasi kinerja per IKU tahun 2023 terhadap target akhir Renstra

Capaian kinerja DMIS terhadap target Renstra tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Capaian 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100 persen. Target dan capaian ini diupayakan sama setiap tahunnya, karena target yang ditetapkan adalah seluruh permintaan penyusunan metodologi sensus dan survei akan dipenuhi.

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 1 : Tersedianya Metodologi dan Sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas				
01 Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	100,00	100,00	100,00

#### 3.1.4. Analisis Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik (DDS), 2023

##### A. Realisasi kinerja per IKU dari tahun 2023 sampai dengan tahun pertama periode Renstra

Dilihat dari target, realisasi dan capaian kinerja pada masing masing indikator, perkembangan capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Tujuan 02</b> Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I pelaksanaan kegiatan statistik						
01 Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Jumlah sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I	Instansi	2020	14	10	71,43
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan	Aktivitas	2020	3	4	133,33
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	2021	30,00	67,16	120,00
			2022	38,00	86,49	120,00
			2023	100	100	100,00
<b>Tujuan 03</b> Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)						
01 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Poin	2020	80	90,41	113,01
			2021	85,00	88,36	103,95
		Persen	2022	82,00	88,77	108,00
			2023	83	88,78	106,96

Tabel di atas memperlihatkan bahwa satuan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 dan 2021 berbeda dengan tahun 2022 dan 2023. Terdapat perubahan metode pengukuran IKU Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan, sehingga target dan realisasi IKU pada tahun 2020 dan 2021 dengan target dan realisasi IKU tahun 2022 dan 2023 tidak dapat dibandingkan. Namun tingkat capaian kinerja tetap dapat dibandingkan.

IKU : Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan	Aktivitas	2020	3	4	133,33
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	2021	30,00	67,16	120,00
		2022	38,00	86,49	120,00
		2023	100,00	100,00	100,00

Capaian kinerja pada indikator Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan dan indikator Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik selama dua tahun capaian kinerja indikator ini selalu mencapai 120,00 persen, hal ini menunjukkan bahwa BPS telah bersungguh-sungguh melakukan pembinaan statistik kepada K/L/D/I.

Pada tahun 2023, terdapat perubahan target menjadi 100 persen. Dengan adanya perubahan ini, capaian kinerja pada indikator ini sebesar 100 persen.

IKU : Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Poin	2020	80	90,41	113,01
		2021	85,00	88,36	103,95
	Persen	2022	82,00	88,77	108,00
		2023	83,00	88,78	106,96

Realisasi kinerja pada Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 jika dibandingkan pada tahun 2020. Salah satu unsur perbedaan capaian kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2021 dan 2022 adalah adanya perbedaan metode yang digunakan pada kegiatan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang merupakan sumber dari nilai Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan. Pada dua tahun terakhir nilai realisasi Kepuasan Konsumen terhadap dimensi kualitas layanan berada pada tingkatan yang sama yaitu pada tingkat kinerja unit pelayanan yang baik, hal ini sesuai dengan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

## B. Realisasi kinerja per IKU tahun 2023 terhadap target Renstra tahun 2023

Capaian kinerja DMIS Tahun 2023 terhadap target Renstra di Tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini. Terdapat dua indikator yang mempunyai realisasi melebihi target Renstra tahun 2023. Capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik terhadap target Renstra 2023 dihitung berdasarkan realisasi 2023 terhadap target 2023.

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Renstra 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tujuan 02</b> Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik					
01 Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	45,00	100,00	222,22

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Renstra 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tujuan 03</b> Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)					
01 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Persen	83,00	88,77	106,96

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian tujuan kedua sangat tinggi. Hal ini dikarenakan target yang di tetapkan pada rentra masih belum disesuaikan seperti pada target Perjanjian Kinerja.

### C. Perbandingan realisasi kinerja per IKU tahun 2023 terhadap target akhir Renstra

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta mendukung layanan yang diberikan oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan suatu kegiatan, strategi, dan program yang komprehensif dan terpadu yang tertuang pada rencana strategis 2020-2024. Evaluasi target akhir Renstra 2020-2024 perlu dilaksanakan mitigasi dan antisipasi terhadap pencapaian target pada masing-masing indikator.

Capaian kinerja Deputi Bidang MIS melalui Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra di Tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tujuan 02</b> Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik					
01 Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	53,00	100	188,68
<b>Tujuan 03</b> Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)					
01 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Persen	84,00	88,78	105,69

Sesuai dengan Reviu Renstra Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik tahun 2020–2024 pada indikator Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 53,00 persen. Pada tahun 2023 target tersebut telah tercapai dan melebihi target yaitu dengan realisasi 100,00 persen dan tingkat capaian kinerja lebih dari 188 persen.

Sementara itu, pada indikator Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 84,00 persen. Pada tahun 2023 target tersebut telah tercapai dan melebihi target yaitu dengan realisasi 88,78 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,69 persen. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS. Nilai IKK terhadap pelayanan PST BPS dihitung dari 11 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100.

### 3.1.5. Analisis Capaian Kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS), 2023

#### A. Realisasi kinerja per IKU dari tahun 2023 sampai dengan tahun pertama periode Renstra

Dalam rangka mewujudkan Renstra 2020-2024, sepanjang tahun 2020-2023 Deputi Bidang MIS melalui Direktorat SIS telah berhasil mencapai peningkatan realisasi kinerja. Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja pada IKU Indeks Kepuasan Layanan TI tahun 2020-2023 menurut target Renstra.

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1 : Tersedianya Metodologi dan Sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas					
02 Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, sistem terintegrasi, dan jaringan komunikasi yang andal	Indeks Kepuasan Layanan TI	2020	75	75	100,00
		2021	80	85	106,00
		2022	90	93	103,00
		2023	95	95,06	100,06

Indeks kepuasan layanan TI dihitung untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna dalam memanfaatkan layanan TI. Pada tahun 2023, indeks kepuasan diukur pada seluruh layanan TI yang disediakan Direktorat Sistem Informasi Statistik untuk pengguna melalui portal layanan TI (*halosis.bps.go.id*). Dari target indeks kepuasan layanan TI sebesar 95%, realisasi yang berhasil dicapai adalah sedikit melebihi target sebesar 95,06%. Nilai ini meningkat signifikan dari 75 skala indeks di tahun 2020.

Kendala utama dalam mengukur kepuasan layanan TI adalah belum semua pengguna mengisi survei kepuasan layanan TI. Untuk mengatasinya adalah memberikan

notifikasi untuk pengguna yang belum mengisi *feedback* survei kepuasan layanan TI, dan perlu dilakukan survei kepuasan layanan TI setiap tahun.

Tindak lanjut kedepan akan dibuat surat himbauan kepada pengguna layanan TI untuk memberikan review dan penilaian atas solusi yang diberikan dari Direktorat Sistem Informasi Statistik. Apabila pengguna layanan tidak memberikan penilaian, maka dianggap sudah puas terhadap layanan yang diberikan.

### B. Realisasi kinerja per IKU tahun 2023 terhadap target Renstra Tahun 2023

Untuk mendukung proses pencapaian target Renstra jangka panjang (2020-2024), secara bertahap, Deputi Bidang MIS melalui Direktorat SIS menjalankan program dan kegiatan yang menasar pada pencapaian target Renstra setiap tahunnya. Pada tahun 2023, realisasi kinerja yang berhasil diwujudkan untuk mencapai target Renstra pada tahun ini diuraikan menurut Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawabnya.

Target yang ditetapkan untuk indeks kepuasan layanan TI tahun 2023 sebesar 95 dan berhasil dicapai sedikit melebihi target sebesar 95,06.

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1 : Tersedianya Metodologi dan Sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas			
02 Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, sistem terintegrasi, dan jaringan komunikasi yang andal	Indeks Kepuasan layanan TI	95	95,06

### C. Perbandingan realisasi kinerja per IKU tahun 2023 terhadap target akhir Renstra

Dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024, realisasi indikator kinerja utama yang menjadi tugas Direktorat SIS tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan untuk pencapaian realisasi Indeks Kepuasan Layanan TI tahun 2024 adalah sebesar 98 dan pada tahun ini berhasil dicapai sebesar 95,06. Untuk mencapai target ini pada tahun 2024, secara bertahap Direktorat SIS akan menaikkan nilai pencapaian realisasi indikator ini menjadi 98 pada tahun 2024.

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1 : Tersedianya Metodologi dan Sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas			
02 Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, sistem terintegrasi, dan jaringan komunikasi yang andal	Indeks Kepuasan layanan TI	98	95,06

### 3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

#### A. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Seperti yang telah dibahas pada subab sebelumnya, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei bertugas dalam mengawal pencapaian target kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik pada Tujuan 1 Sasaran Strategis 1. Pada 2023 terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada Direktorat PMSS diantaranya:

##### 1. Analisis Geospasial

Kegiatan terkait analisis geospasial yang dilakukan yaitu:

- Bekerjasama dengan UN Habitat melaksanakan “*Workshop on SDG 11 indicators computations and application of the Degree of Urbanisation (DEGURBA) for production of comparable urban data in Indonesia*” yang diselenggarakan di Bandung, tanggal 19–23 Juni 2023. Acara ini yang juga dihadiri oleh BIG, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam *workshop* ini dipelajari cara menghitung indikator 11 *SDGs* baik spasial maupun non spasial.
- Analisis geospasial hasil *Long Form* SP2020  
Data statistik *official* merupakan fondasi dari perhitungan *SDGs*, namun pada kenyataannya untuk menghasilkan indikator *SDGs* tidak bisa semata-mata menggunakan data statistik. Dalam *the 2030 Agenda for Sustainable Development*, informasi geospasial dan *remote sensing* memiliki erat kaitannya dengan perhitungan beberapa indikator *SDGs*. Contoh indikator *SDGs* yang sangat tergantung dengan informasi geospasial adalah indikator 11.3.1 *ratio of land consumption rate to population growth rate*, atau rasio laju pertumbuhan lahan terhadap laju pertumbuhan populasi.  
Pada kegiatan *Meeting for Development and Evaluation 2020 Population Census Geospatial*, tema indikator *SDGs* 11.3.1 diangkat sebagai tema utama yang akan disandingkan dengan beberapa indikator yang dihasilkan *Long Form* SP2020. Lokus kajian di 10 wilayah metropolitan yang merupakan rencana strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) 2020–2024. Pada akhirnya, output kegiatan ini akan menghasilkan hasil analisis geospasial untuk melihat laju pertumbuhan perkotaan di 10 kawasan metropolitan berdasarkan indikator *SDGs* 11.3.1 dan hasil *Long Form* SP2020.
- Pengolahan data geospasial Statistik Teknologi Informasi  
Dalam rangka penyusunan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks Pembangunan TIK)/*ICT Development Index* tahun 2022 dengan metode baru dari International Telecommunication Union (ITU) versi 3, dibutuhkan dua indikator yaitu persentase populasi yang tercakup oleh minimal jaringan mobile 3G dan persentase populasi yang tercakup oleh minimal jaringan LTE/WiMAX.

##### 2. Pemeliharaan Sistem Informasi Geografis Terkait

- Pengembangan *Geospatial System*

- Pembangunan *Web GIS* dan *Story Map* Hasil Analisis Geospasial
- 3. Pengembangan Aplikasi Geospasial Lainnya**
- Pembangunan aplikasi wilkerstat untuk Survei Lembaga Keuangan (SLK)
  - Pembangunan aplikasi wilkerstat untuk Survei Konstruksi 2023
  - Pembangunan aplikasi wilkerstat untuk Survei Industri Mikro dan Kecil 2023
- 4. Satu Data Indonesia: Kode Referensi dan Data Induk**
- *Bridging* Kode relasi yang dilakukan setiap semester
- 5. Pembuatan Peta Tematik dan Penyediaan Data**
- Pembuatan Peta Tematik
    - Peta Tematik Sensus Pertanian 2023
    - Peta Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2023
    - Peta Indeks Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
  - Penyediaan peta untuk keperluan berbagai survei dari Kementerian/Lembaga:
    - Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan.
    - Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk Survei Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Tahun 2023 kerjasama dengan BPOM.
    - Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk Survei Prevalensi Pengguna Narkoba kerjasama dengan BNN.
    - Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk Survei Kesehatan Indonesia 2023 kerjasama dengan Kemenkes.
    - Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk keperluan PKL Politeknik STIS.
    - Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk keperluan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah 2023 dan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah 2023 kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- 6. Kerangka Sampel Area (KSA)**
- Penggantian sampel KSA
  - Sinkronisasi pengajuan sampel yang disetujui
- KSA didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG), pengideraan jauh, teknologi informasi, dan statistika yang saat ini sedang diimplementasikan di Indonesia untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan. Pendekatan KSA diharapkan mampu menjawab penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional. Kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan modul penggantian sampel KSA pada sistem KSAPro.
- 7. Pembuatan Peraturan/Regulasi terkait Wilkerstat**
- Perubahan kode dan nama wilkerstat
- Regulasi tentang Kode dan Nama Wilkerstat dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 Tahun 2023. Dalam Keputusan



tersebut, jumlah kabupaten kota, kecamatan dan desa kondisi 2023 semester 1 adalah sejumlah 416 kabupaten, 98 kota, 7.288 kecamatan dan 83.971 desa.

- Pembuatan Perka Buku Pedoman Pelatihan Pengolahan Peta dan Titik bangunan Hasil ST2023.

## B. Direktorat Diseminasi Statistik

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, terdapat indikator tambahan pada Direktorat Diseminasi Statistik yaitu pada Tujuan 2 dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar dan Tujuan 3 dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri dan Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan.

### 1. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tujuan 2 Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, Standardisasi dalam Penyelenggaraan SSN</b>					
Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	76,00	81,08	107,14

Indikator Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar, pada tahun 2023 memiliki target sebesar 76,00 persen. Pada tahun 2023 target tersebut tercapai yaitu sebesar 81,08 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 107,14 persen. Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat diseminasi statistik terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik sehingga memacu peran aktif K/L/D/I dalam menyampaikan metadata sektoral sesuai standar tersebut. Namun keberhasilan ini, juga masih memiliki kendala yang dihadapi seperti perubahan sistem aplikasi pengelolaan metadata statistik yang saat ini menggunakan Indonesia Data Hub (INDAH).

Solusi yang telah dilaksanakan pada kendala diatas antara lain pengembangan aplikasi pengelolaan metadata statistik pada Sistem Indonesia Data Hub (INDAH) terus dilakukan agar mempermudah pengguna K/L/D/I dalam menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar, sekaligus mempermudah pemeriksa metadata sektoral. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan Direktorat Diseminasi Statistik agar capaian kinerja indikator ini dapat meningkat di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam penyusunan metadata sektoral dan khusus.

- b. Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan aplikasi pengelolaan metadana statistik pada Sistem Indonesia Data Hub (INDAH).

2. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tujuan 3 Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN</b>					
Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri	Persen	50,00	51,35	102,70

Indikator Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 38,00 persen. Pada tahun 2022 target tersebut tercapai yaitu sebesar 49,00 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 120 persen. Keberhasilan pencapaian target ini dikarenakan Meningkatnya kolaborasi Direktorat Diseminasi Statistik dengan *Subject Matter* BPS sebagai pembina data statistik dalam melakukan pembinaan statistik sektoral secara intensif baik dalam pertemuan luring maupun daring dengan K/L/D/I. Namun keberhasilan ini, juga masih memiliki kendala yang dihadapi seperti belum berakhirnya pandemi COVID-19, serta terbatasnya alokasi anggaran APBN untuk pembinaan statistik sektoral memberi ruang gerak yang sangat terbatas untuk melakukan proses pembinaan menyeluruh dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Solusi yang telah dilaksanakan pada kendala diatas adalah memanfaatkan anggaran secara efektif yaitu menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral secara intensif dalam pertemuan luring dan meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan secara daring. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan Direktorat Diseminasi Statistik agar capaian kinerja indikator ini dapat meningkat di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kolaborasi Direktorat Diseminasi Statistik dengan Subject Matter BPS sebagai pembina data statistik dalam melakukan pembinaan statistik sektoral.
- b. Meningkatkan perencanaan anggaran pada proses pembinaan sektoral secara menyeluruh dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

### C. Direktorat Sistem Informasi Statistik

Direktorat Sistem Informasi Statistik memiliki tugas mengawal pencapaian sasaran strategis terkait layanan TI, yaitu “Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, sistem terintegrasi, dan jaringan komunikasi yang andal”.

Perkembangan TIK menjadi tantangan sekaligus kesempatan dalam mendukung penyelarasan strategi bisnis dan TI. Inisiatif transformasi digital sebagai perwujudan

perkembangan TIK juga menuntut terwujudnya konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di dalam tata kelola instansi pemerintah Indonesia. SPBE merupakan upaya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis elektronik dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK. SPBE dapat meningkatkan kualitas proses pelayanan dari instansi pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Selain itu, SPBE mampu mengontrol kinerja pemerintah oleh masyarakat. Penerapan *e-government* membuat tata kelola pemerintahan bisa berjalan lebih efisien, mudah diakses, dan lebih transparan untuk menuju *good and open government* di Indonesia.

SPBE mendorong digulirkannya Transformasi Digital. Oleh karena itu, inisiatif transformasi digital di BPS diselaraskan untuk mewujudkan penerapan SPBE di lingkungan BPS. Sehingga BPS Transformasi TIK perlu dilakukan secara komprehensif, efektif, dan terpadu agar mewujudkan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unit organisasi. Untuk memastikan kesamaan langkah Transformasi Digital diperlukan panduan bagi seluruh komponen di BPS. Panduan ini dituangkan dalam Rencana Transformasi Digital BPS. Dengan Rencana Transformasi Digital ini diharapkan bisa mewujudkan tercapainya penerapan SPBE di BPS melalui pemanfaatan TIK sebagai enabler untuk keberlangsungan tugas dan fungsi BPS sebagai pelopor data statistik tepercaya untuk semua. Inilah yang menjadi kunci utama pengembangan suprastruktur TI di BPS. Untuk memastikan keselarasan tersebut maka Rencana Transformasi Digital harus selaras dan mendukung Rencana Strategis BPS untuk jangka waktu 2020-2024. Penyelarasan strategi bisnis dan TI ini diwujudkan dalam kegiatan pengembangan dan pengkajian Strategi dan Desain TI yang memegang peran utama dalam pengembangan suprastruktur TI di BPS, menghasilkan:

- a. Strategi TI BPS: Rencana strategis TI BPS yang memuat tujuan, prinsip, strategi, roadmap, kapasitas dan kapabilitas, sosialisasi, dan kerangka kerja TI.
- b. Tata Kelola dan Manajemen TI: Kebijakan mengenai tata kelola dan manajemen fasilitas dan layanan TI secara konsisten sesuai dengan prioritas, keputusan, dan kebutuhan BPS. Pada tahun 2023, beberapa dokumen tata kelola dan manajemen TI yang disusun menyesuaikan dengan tata kelola dan manajemen TI yang diamanahkan oleh SPBE Nasional.
- c. *Enterprise Architecture* merupakan Arsitektur yang menggambarkan hubungan antara proses bisnis, layanan, data, aplikasi, infrastruktur dan keamanan untuk memperlihatkan bentuk dari suatu organisasi. Pada tahun 2023, telah dilakukan pemeliharaan dan pengembangan repositori arsitektur TI pada *Digital Enterprise Architecture* (DEA), dengan mempedomani pada domain arsitektur SPBE nasional, yang mencakup arsitektur proses bisnis, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi, arsitektur data/ informasi, arsitektur infrastruktur/teknologi, dan arsitektur keamanan. Selain itu telah dilakukan migrasi artefak arsitektur BPS ke SIA SPBE Nasional.
- d. Manajemen Layanan BPS: Pengelolaan layanan TI yang digunakan untuk mendukung kegiatan BPS, yang meliputi standardisasi dalam pembuatan/pengembangan aplikasi statistik dan dukungan terhadap metode, strategi, proses dan *tools* yang digunakan, meningkatkan efisiensi layanan TI, dan pengembangan SOP manajemen layanan TI. Pada tahun 2023, pengembangan yang telah dilakukan di tahun sebelumnya terkait sistem manajemen layanan TI yang lebih mengacu pada praktik terbaik *Information Technology Service Management*

(ITSM), khususnya untuk area insiden dan permintaan, disempurnakan dengan dibuatnya survei yang akan langsung diisi oleh pengguna layanan ketika tiket insiden dan permintaan telah dipenuhi. Selain itu, telah dilakukan update terhadap katalog dan *Service Level Agreement (SLA)* layanan TI BPS.

- e. Prioritisasi, Roadmap, dan Rencana Transformasi TI; menjadi pedoman dalam melaksanakan proyek dan belanja TIK BPS. Pada tahun 2023 telah dilakukan proses pengkajian terhadap peta rencana SPBE BPS (*Roadmap* TI) yang sejalan dengan peta rencana SPBE Nasional.

Selain dari implementasi area kegiatan Strategi dan Desain TI tersebut, kegiatan transformasi TI dalam mendukung penyelarasan strategi bisnis dan TI juga dilakukan untuk kegiatan operasional suprastruktur TI lainnya yang mendukung penyelenggaraan SPBE di BPS, yaitu:

- a. Pranata Komputer,

BPS dipercaya pemerintah untuk menjadi instansi pembina untuk jabatan fungsional Pranata Komputer (Prakom). Capaian kegiatan pengembangan Prakom pada tahun 2023 antara lain mendukung:

- Pelaksanaan pelatihan fungsional untuk Pranata Komputer baik dari BPS, Kementerian, Lembaga hingga Pemerintah Daerah.
- Finalisasi Standar Kompetensi Jabatan Pranata Komputer.

Kegiatan pembinaan dan dukungan terhadap Pranata Komputer pada tahun 2023 masih akan berjalan (yang sifatnya membantu kegiatan pengembangan dan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS).

- b. Penyelenggaraan SPBE,

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, BPS mendesain rencana transformasi digitalnya. Rencana Transformasi Digital BPS disusun selaras dengan peta rencana SPBE nasional. Capaian kegiatan Penerapan SPBE pada tahun 2023 antara lain:

- Melakukan reviu dan perbaikan terhadap kebijakan internal BPS terkait SPBE.
- Melengkapi dokumen-dokumen manajemen SPBE BPS seperti Manajemen Risiko, Audit TI dll.
- Melakukan reviu dan perbaikan terhadap seluruh layanan TI BPS sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan.
- Melakukan penilaian mandiri SPBE tahun 2023.

- c. Dukungan terhadap penyelenggaraan administrasi dan dokumentasi Reformasi Birokrasi melalui penerapan RB General dan RB Tematik. Direktorat SIS sebagai Unit penanggung jawab TIK di BPS memegang peran penting untuk keberhasilan penerapan RB General dan tematik tersebut melalui dukungan TIK. Sebagai contoh dalam mendukung penerapan RB Tematik dalam hal pengetasan kemiskinan, Direktorat SIS memberikan dukungan berupa pembangunan Portal Regsosek yang merupakan Portal yang berisikan data sosial ekonomi nasional yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan.

- d. Manajemen Risiko TI

Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE. Berbagai risiko yang timbul dalam penerapan SPBE harus dikelola dengan baik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara SPBE. Untuk menjamin keberlangsungan penerapan SPBE, diperlukan manajemen risiko SPBE yang dilaksanakan oleh BPS untuk mencapai tujuan SPBE sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kegiatan manajemen risiko TI merupakan implementasi dari manajemen risiko SPBE sebagai bentuk penyelenggaraan kegiatan manajemen risiko di bidang TI. Kegiatan implementasi manajemen risiko TI ini juga sejalan dan selaras dengan kegiatan manajemen risiko BPS.

Aktifitas penerapan manajemen risiko TI yang dilakukan pada tahun 2023 mendukung implementasi manajemen risiko organisasi, yang mencakup:

- Manajemen Risiko TI untuk Sensus Pertanian 2023 (ST 2023).
- Integrasi Manajemen Risiko Instansi dengan Manajemen Risiko SPBE.
- Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Risiko BPS (MARITEMEN).

e. Manajemen Perubahan TI.

Kegiatan manajemen perubahan TI merupakan implementasi dari manajemen perubahan SPBE sebagai bentuk penyelenggaraan kegiatan manajemen perubahan di bidang TI. Kegiatan implementasi manajemen perubahan TI ini juga sejalan dan selaras dengan kegiatan manajemen perubahan BPS

Aktifitas penerapan manajemen perubahan TI yang dilakukan pada tahun 2023 mendukung implementasi manajemen perubahan organisasi, yang hasilnya sebagai berikut:

- Pembentukan struktur manajemen perubahan TI di Direktorat SIS tahun 2023, yang mencakup *Change Leader (CL)*, *Change Champion (CC)*, dan *Change Agent Network (CAN)*.
- Realisasi kegiatan manajemen perubahan SIS berdasarkan rencana kinerja CC SIS, mencakup:
  - ✓ Kamis EKSIS (*Expanding Knowledge with SIS*), sebelumnya bernama Jumat BERKAH (Berbagi Keahlian).
  - ✓ Sosialisasi Berakhlak Day Melalui Program Manajemen Perubahan.
  - ✓ PrakomID Menyapa melalui Webinar seputar Pranata Komputer.
  - ✓ *Compass Management*: Dukungan Mekanisme Tata Kerja Baru di SIS.

f. Audit SPBE

Audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menentukan dipatuhinya prosedur yang baku, instruksi, spesifikasi, kode, standar, administrasi atau program operasi yang dilakukan dalam bidang teknologi informasi. Pada penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), audit TIK telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 pasal 55 hingga 58 dimana audit TIK terdiri dari audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE. BPS telah mengeluarkan kebijakan internal terkait Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit

TIK di lingkungan BPS. Berikut adalah capaian dari ketiga jenis audit SPBE tersebut:

- **Audit Aplikasi**

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 pasal 55 tentang Audit TIK SPBE, diselenggarakan kegiatan Audit Teknologi Informasi (TI) Internal di lingkungan BPS. Kegiatan audit yang diselenggarakan mencakup 3 area yaitu Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE. Pada area Audit Aplikasi SPBE, objek audit yang ditentukan yaitu aplikasi FASIH BPS (*Flexible Authentic Survey Instrument Harmony*) yang termasuk ke dalam kategori aplikasi khusus.

- **Audit Infrastruktur**

BPS dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat SIS telah melaksanakan kegiatan audit internal infrastruktur pusat data SPBE sebagai bentuk pengawasan internal dalam penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur pusat data SPBE di lingkungan BPS.

- **Audit Keamanan**

Direktorat SIS telah melaksanakan audit keamanan baik secara internal maupun dengan melibatkan pihak eksternal dalam hal ini adalah BSSN sebagai penanggungjawab keamanan informasi nasional. Pelaksanaan audit keamanan internal dilaksanakan oleh Tim Audit Internal SPBE BPS yang telah ditetapkan SK tim audit internal BPS. Audit keamanan eksternal dilakukan oleh BSSN melalui satgas perlindungan data dengan cakupan kegiatan meliputi:

- ✓ Validasi dan kategorisasi sistem elektronik
- ✓ Penghitungan indeks keamanan informasi (KAMI)
- ✓ Pelaksanaan ITSA (*Information Technology Security Assessment*) pada tujuh aplikasi prioritas
- ✓ Pengendalian informasi pada media sosial
- ✓ Operasi sandi (pengecekan keamanan pada ruangan pimpinan dan anjuran penggunaan sandi/enkripsi)

g. **Sertifikasi Keamanan Informasi**

Pada tahun 2023 BPS melakukan sertifikasi keamanan informasi pada area *Provision of Data Center and Disaster Recovery Center Operation, Host-to-Host and Application Programming Interface (API)* Dukcapil. Kegiatan sertifikasi diawali dengan penyusunan kebijakan dan prosedur terkait keamanan informasi pada lingkungan Direktorat Sistem Informasi Statistik, sosialisasi, implementasi serta audit internal. Selanjutnya audit eksternal dilakukan untuk memperoleh sertifikasi pada area terkait. Keseluruhan kegiatan ini dilakukan untuk menjamin keamanan informasi utamanya pada area data center sebagai infrastruktur utama yang menyediakan layanan TI di BPS.

## 3.2. Prestasi dan inovasi Deputi MIS tahun 2023

Prestasi-prestasi yang telah dicapai Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik pada tahun 2023 diantaranya:

1. Opini kualitas tinggi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) dengan nilai 91,02 (Zona Hijau).
2. Peningkatan nilai Indeks SPBE BPS. Direktorat SIS sebagai penanggung jawab pelaksanaan implementasi SPBE di lingkungan BPS bersama-sama dengan seluruh stakeholder BPS lainnya telah berhasil meningkatkan nilai indeks SPBE BPS yang semula 3,81 pada tahun 2021 menjadi 4,17 pada tahun 2023 ini dan masuk ke dalam kategori sangat baik.
3. Masuk dalam kategori Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 atas inovasinya dalam membangun Indonesia Data Hub (INDAH)
4. Memperoleh penghargaan dari BSSN untuk Verifikasi Indeks Kami Tahun 2023 dengan skor sebesar 597 dengan kategori Cukup Baik.
5. Memperoleh sertifikasi ISO 27001:2022 untuk *area Provision of Data Center and Disaster Recovery Center Operation, Host-to-Host and Application Programming Interface (API) Dukcapil*.



Gambar 3. Sertifikasi ISO 27001:2022

5. Perluasan pemanfaatan aplikasi FASIH untuk pengumpulan data Kementerian/Lembaga lain.
6. Perluasan pemanfaatan aplikasi BOS (Backoffice) untuk BPS seluruh Indonesia.
7. Penyelenggaraan evaluasi layanan TI (Retrospeksi TI) secara menyeluruh untuk seluruh unit kerja di BPS Pusat.
8. Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Novia Permatasari) yang mengikuti Workshop on "Application of the Degree of Urbanisation (DEGURBA) for Production of Comparable Urban Data In Select Countries" diselenggarakan di Nairobi, Kenya, 14-16 November 2023.
9. Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Wida Widiastuti) yang berpartisipasi dalam 4th International Seminar on Big Data for Official Statistics Remote Sensing for Agriculture Statistics pada 15-17 November 2023 di Hangzhou, China.
10. Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Novia Permatasari) yang mempublikasikan artikel ilmiah berjudul *Small area estimation of household expenditure on insurance programs for minimizing the impact of natural disasters in West Java, Indonesia* pada Statistical Journal of the IAOS, vol. 39, no. 3, pp. 729-743, 2023.

11. Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Muhammad Yunus Hendrawan) yang berpartisipasi dalam mempublikasikan artikel ilmiah berjudul *Google trends and online media data for supply and demand information in waste management evaluation in Jakarta pada Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science* (Jurnal Terindeks Sinta 1, Scopus Q3), vol. 30, no. 2, pp. 1140-1149, 2023.
12. Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Muhammad Yunus Hendrawan) yang berpartisipasi dalam mempublikasikan artikel ilmiah berjudul *Strategic insights for MSMEs: navigating the new normal with big data and business analytics* pada *Journal of Asia Business Studies* (Jurnal Terindeks Scopus Q1), 2023.
13. Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Wida Widiastuti) yang masuk ke dalam Geospatial Team di United Nations (UN).
14. Terlibat sebagai penyelenggara *UN Workshop on Big Data* dengan tema "*Introduction to Remote Sensing and Land Cover Classification using Remote Sensing*".
15. Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Annisarahmi Nur Aini Aldania) yang mengikuti *Workshop on "28th Meeting of the Wiesbaden Group on Business Registers"* diselenggarakan di Den Haag, Belanda, 2-6 Oktober 2023.
16. Partisipasi tim SBR sebagai peserta dalam *Webinar series on the Global Initiative on Unique Identifiers for Business* yang diselenggarakan oleh *United Nation Statistics Division* (UNSD). Webinar series terdiri dari 3 series yang dilaksanakan di bulan Oktober dan November 2023 dan Januari 2024.
17. Partisipasi aktif tim SBR dalam pertemuan *Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESERIC) Conference* dalam memberikan paparan terkait SBR di Indonesia.
18. Partisipasi tim SBR sebagai peserta kursus pada kegiatan *Machine Learning for Official Statistics and the SDGs-2023* yang diselenggarakan oleh *United Nation Statistical Institute for Asia Pacific* (UN SIAP).
19. Tim SBR (Ayu Setyawati) ikut serta dalam kegiatan *Technical Assistance* di Melbourne yang diselenggarakan oleh *Australian Bureau of Statistice* (ABS) bulan Mei 2023.
20. Tim SBR sebagai peserta *Online Training* pada kegiatan *Linking Trade with Business Statistics* yang diselenggarakan oleh *ASEANstats* berkoordinasi dengan *Departement of Statistics Malaysia* (DOSM) pada Mei 2023.
21. Keikutsertaan tim SBR berdiskusi dengan tim *Program Management ABS* pada November 2023 yang beragendakan penyampaian kondisi terkini SBR dan dukungan dari ABS.
22. Terlibat sebagai penyelenggara *UN Habitat Workshop on "SDG 11 indicators computations and application of the Degree of Urbanisation (DEGURBA) for production of comparable urban data in Indonesia"* yang diselenggarakan di Bandung, tanggal 19–23 Juni 2023.
23. Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Novia Permatasari) yang turut berpartisipasi dalam *Kompetisi Data Conquest Kementerian Keuangan 2023* dan meraih Juara I dengan kajian ilmiah berjudul "*Geotax Insight: Menjejak Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Citra Satelit*".
24. Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Wida Widiastuti) yang terpilih menjadi *Finalis Nasional Insan Statistik Teladan 2023*.
25. Membuat kegiatan *Sharing Knowledge Pre-Processing Data Remote Sensing* untuk Fase Tumbuh Padi dengan narasumber dari BRIN.
26. Terdapat pegawai Direktorat PMSS (Arif Handoyo Marsuhandi) yang turut berpartisipasi dalam kursus "*Data 4 Development CSIRO*" yang diselenggarakan di Canberra, Australia pada tanggal 12 Oktober – 20 Desember 2023.



27. Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang turut berpartisipasi dalam *eLearning Course Machine Learning for Official Statistics and SDG Indicators*, pada tanggal 27 November 2023 – 19 Januari 2024.

### 3.3. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023

#### 3.3.1. Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Sasaran

##### A. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Pagu anggaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei menjalankan fungsi pemerintahan dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik selama tahun 2023 adalah sebesar 2,6 milyar rupiah. Realisasi anggaran menurut program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Menurut Program Tahun 2023**

No.	Program	Pagu 2023 (Rp)	Realisasi s/d Desember 2023 (Rp)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik				
2900 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei				
005	Dokumen, laporan, dan publikasi pengembangan metodologi sensus dan survei	391.023.000	386.646.953	98,88
2910. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				
006	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	2.209.714.000	2.111.235.106	95,54
<b>Jumlah</b>		<b>2.600.737.000</b>	<b>2.497.882.059</b>	<b>96,05</b>

Secara umum, penyerapan anggaran pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sudah dilakukan dengan sangat maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran sebesar 96,05 persen. Penyerapan anggaran pada kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Kode 2900) sebesar 98,88 persen dan kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Kode 2910) sebesar 95,54 persen. Seluruh program pada Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei merupakan dukungan pada Sasaran Strategis Pertama Tujuan 1 Deputi Bidang MIS.

##### B. Direktorat Diseminasi Statistik

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung tugas pokok Direktorat Diseminasi Statistik diberikan melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA

Bagian Anggaran 54 sebesar 8,926 milyar rupiah. Anggaran tersebut bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar 1,021 milyar rupiah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 7,905 milyar rupiah. Realisasi penggunaan anggaran RM mencapai 91,49 persen dan untuk PNBP mencapai 46,55 persen. Pagu dan realisasi anggaran menurut sumber anggaran dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

**Tabel 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Diseminasi Statistik Menurut Sumber Anggaran Tahun 2023**

Kode	Sumber Anggaran	Anggaran (Rupiah)			Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	Sisa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2897	APBN (PNBP)	7.904.988.000	3.679.584.078	4.225.403.922	46,55
2897	APBN (RM)	1.020.643.000	933.784.893	86.858.107	91,49
2897	Total (PNBP+RM)	8.925.631.000	4.613.368.971	4.312.262.029	51,69

Pemanfaatan anggaran untuk mencapai kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya pelayanan prima dan meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN. Masing-masing besaran anggaran yang dimanfaatkan seperti tertera pada tabel 9 dibawah ini.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, anggaran yang dimanfaatkan sebesar 4,228 milyar rupiah dimana sebagian besar anggaran bersumber dari PNBP. Realisasi anggaran pada Desember 2023 mencapai 49,65 persen, hal ini dikarenakan anggaran PNBP yang masuk ke APBN BPS melampaui anggaran yang direncanakan di awal tahun. Anggaran PNBP dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan prima baik untuk BPS Pusat maupun BPS Provinsi, antara lain pengajuan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan peningkatan kualitas penyelenggaraan PST BPS Provinsi sesuai standar evaluasi Kementerian PAN-RB dan Ombudsman RI, sekaligus mencapai target implementasi kegiatan yang menjadi *Quick Wins* BPS yaitu penyelenggaraan dan pembinaan Pojok Statistik di seluruh provinsi.

Pencapaian kinerja pada sasaran meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN, memanfaatkan anggaran sebesar 385 juta rupiah yang seluruhnya bersumber dari RM dengan realisasi dari pagu yang disediakan mencapai 93,93 persen. Anggaran dimanfaatkan untuk koordinasi dan kerjasama antara BPS sebagai pembina data statistik dengan Kementerian/Lembaga sebagai produsen dan walidata data statistik sektoral.

**Tabel 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Diseminasi Statistik Menurut Sasaran Tahun 2023**

Program dan Sasaran Strategis	Anggaran (Rupiah)			Capaian (%)
	Pagu	Realisasi	Sisa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik				
01 Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	8.515.711.000	4.228.320.822	4.287.390.178	49,65
02 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	409.920.000	385.048.149	24.871.851	93,93

### C. Direktorat Sistem Informasi Statistik

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Direktorat SIS pada tahun 2023 dibiayai dengan APBN Tahun 2023. Pemanfaatan anggaran digunakan untuk mencapai kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal; tersedianya *platform data hub* yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan SDI; dan terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam kerangka transformasi digital.

**Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Sistem Informasi Statistik Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal	10.160.726.000	9.568.077.006	94,17
Tersedianya <i>platform data hub</i> yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan SDI (Stakeholder Satisfaction)	23.317.800.000	23.124.951.964	99,17

Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam kerangka transformasi <i>digital</i> (Internal Process)	660.701.000	558.295.720	84,50
<b>Total</b>	<b>34.139.227.000</b>	<b>33.251.324.690</b>	<b>97,40</b>

Nilai pagu yang diberikan untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar 34 miliar rupiah dengan alokasi 10 miliar rupiah untuk sasaran kualitas layanan TI, 23 miliar rupiah untuk sasaran platform data hub, dan 660 juta rupiah untuk sasaran keselarasan strategi TI dan bisnis. Persentase realisasi secara keseluruhan sebesar 97,40 % dengan persentase realisasi tertinggi pada sasaran kedua yaitu platform data hub sebesar 99,17% diikuti dengan sasaran pertama yaitu kualitas layanan TI sebesar 94,17%, dan persentase realisasi terendah pada sasaran ketiga yaitu sasaran keselarasan strategi bisnis dan TI sebesar 84,50 persen.

### 3.3.2. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran

#### A. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja dan realisasi anggaran menurut program dan sasaran Direktorat PMSS Tahun 2023.

No.	Program/Sasaran	Pagu 2023 (Rp)	Realisasi s/d Desember 2023 (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik					
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas					
1	Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	1.086.158.000	1.022.494.880	94,14	100,00
2	Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan	186.445.000	185.496.779	99,49	100,00

No.	Program/Sasaran	Pagu 2023 (Rp)	Realisasi s/d Desember 2023 (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran				
3	Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	120.760.000	120.012.954	99,38	200,00
4	Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	1.207.374.000	1.169.877.446	96,89	100,00
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data					
5	Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	0	0	0	100,00
6	Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	0	0	0	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.600.737.000</b>	<b>2.497.882.059</b>	<b>96,05</b>	

**Indikator pertama: Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas**

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran satu pada tujuan pertama sebesar Rp1.086.158.000,00. Dari anggaran yang disediakan selama tahun 2023 dapat diserap sebesar Rp1.022.494.880,00 atau sebesar 94.14 persen. Anggaran ini berasal dari kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dan kegiatan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Anggaran yang berasal dari kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, direncanakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan supervisi evaluasi pengembangan desain sensus dan survei ke BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyerapan ini sebagian besar digunakan untuk melakukan supervisi ke BPS Provinsi/Kabupaten/Kota terkait penerapan metodologi sampling dalam pelaksanaan survei BPS, namun pelaksanaannya belum optimal.

Sementara anggaran yang berasal dari kegiatan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan digunakan untuk mendukung kegiatan *Post Enumerations Survey* (PES) Sensus Pertanian Tahun 2023. Kegiatan PES ST2023

dilaksanakan di 34 provinsi meliputi 5.892 SLS yang tersebar di 230 sampel kabupaten/kota. Penyerapan ini sebagian besar digunakan untuk melakukan supervisi pengendalian dan evaluasi kegiatan lapangan PES ST2023 ke BPS Kabupaten/Kota baik pada pengumpulan data lapangan dan rekonsiliasi lapangan, serta pengiriman koordinator *matching* pada kegiatan *matching* di BPS Provinsi.

Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun realisasi anggaran tidak terserap 100 persen tetapi capaian kinerja dapat dilakukan secara maksimal.

### **Indikator kedua: Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran**

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran kedua pada tujuan pertama untuk menyediakan kerangka sampel usaha dan rumah tangga yang akurat sebesar Rp186.445.000,00. Anggaran ini berasal dari kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Anggaran ini direncanakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan *Groundcheck* SBR, *fullboard* evaluasi *enumeration area* (EA) SLS, *fullboard* evaluasi register usaha, honor narasumber dan supervisi. Supervisi ke BPS Provinsi/Kabupaten/Kota mencakup kegiatan pengecekan lapangan data SBR, evaluasi EA SLS, dan pengawasan kualitas pemutakhiran MFD dan MBS.

Dari anggaran yang disediakan selama tahun 2023 dapat diserap Rp185.496.779,00 atau sebesar 99,49 persen. Penyerapan ini sebagian besar digunakan untuk melakukan supervisi ke BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pengecekan lapangan *Groundcheck* SBR-QIS dan pengawasan kualitas pemutakhiran MFD dan MBS. Honor narasumber dimanfaatkan untuk kegiatan *fullboard* evaluasi register usaha dan kegiatan *profiling* SBR. Agar penyerapan dapat optimal paket internet *briefing* provinsi *Groundcheck* SBR-QIS dan sebagian honor narasumber yang tidak digunakan dilakukan revisi untuk kegiatan konfirmasi hasil *Groundcheck* SBR-QIS dan identifikasi pengembangan SBR. Sedangkan *fullboard* evaluasi EA SLS dan supervisi EA SLS dilakukan revisi untuk kegiatan *fullboard* evaluasi register usaha dan supervisi pengawasan kualitas pemutakhiran MFD dan MBS karena anggaran kegiatan EA SLS di daerah ditiadakan. Pagu yang masih ada merupakan sisa penyerapan dari transport lokal *fullboard* evaluasi register usaha, supervisi pengecekan lapangan data SBR, serta pengawasan kualitas pemutakhiran MFD dan MBS.

Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun realisasi anggaran tidak terserap 100 persen tetapi capaian kinerja dapat dilakukan secara maksimal.

### **Indikator ketiga: Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data**

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran ini pada tujuan pertama sebesar Rp120.760.000,00. Dari anggaran yang disediakan selama tahun 2023 dapat diserap Rp120.012.954,00 atau sebesar 99,38 persen. Anggaran yang berasal dari kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, direncanakan untuk pembiayaan

pelaksanaan kegiatan *fullboard* standar data statistik ekonomi, honor narasumber, pencetakan publikasi klasifikasi, dan supervisi klasifikasi dan standar data.

Penyerapan ini sebagian besar digunakan untuk Workshop Harmonisasi Peraturan BPS tentang Standar Data Statistik 2022 yang dilaksanakan pada bulan September 2023 dan supervisi standar data dan klasifikasi ke BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun realisasi anggaran tidak terserap 100 persen tetapi capaian kinerja dapat dilakukan secara maksimal.

#### **Indikator keempat: Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas**

Anggaran yang dialokasikan untuk menyediakan master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas sebesar Rp1.207.374.000,00. Dari anggaran yang disediakan selama tahun 2023 dapat diserap Rp1.169.877.446,00 atau sebesar 96,89 persen. Anggaran ini berasal dari kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Anggaran yang berasal dari kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan direncanakan untuk pembiayaan kegiatan *fullboard* luar kota dan perlengkapan Rekonsiliasi Kerangka Geospasial ST2023, honor narasumber dan supervisi pengolahan peta hasil ST2023. Pagu yang masih ada merupakan sisa penyerapan dari supervisi pengolahan peta hasil ST2023 yang belum optimal.

Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun realisasi anggaran tidak terserap 100 persen tetapi capaian kinerja dapat dilakukan secara maksimal.

#### **Indikator kelima: Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei**

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran ini pada tujuan kedua tidak ada karena pembinaan dilakukan berdasarkan permintaan dari Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) baik dari internal maupun eksternal BPS. Hal ini dilaksanakan karena adanya undangan baik sebagai peserta atau narasumber.

Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun anggaran tidak tersedia tetapi capaian kinerja dapat dilakukan secara maksimal.

#### **Indikator keenam: Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei**

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran ini pada tujuan kedua tidak ada karena kerjasama dilakukan berdasarkan permintaan dari eksternal BPS atau K/L/D/I yang terkait dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antara kedua belah pihak.

Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun anggaran tidak tersedia tetapi capaian kinerja dapat dilakukan secara maksimal.

## B. Direktorat Diseminasi Statistik

Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat Diseminasi tahun 2023 pada kedua sasaran strategis yang ingin dicapai lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran tahun 2022. Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan prima mencapai 106,96 persen dengan memanfaatkan anggaran 49,65 persen dari anggaran yang direncanakan. Sedangkan pada pencapaian kinerja sasaran meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN sebesar 100,00 persen dengan memanfaatkan anggaran sebesar 93,93 persen dari anggaran yang direncanakan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran pada penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai capaian kinerja yang optimal.

Program dan Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik		
01 Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	106,96	49,65
02 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	100,00	93,93

## C. Direktorat Sistem Informasi Statistik

Perbandingan capaian kinerja dan realisasi anggaran untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik pada masing-masing sasaran dan indikator dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Rata-rata capaian kinerja pada keseluruhan sasaran sebesar 100,02% sedangkan persentase realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar 97,40%. Secara umum, capaian kinerja Direktorat SIS pada tahun 2023 menunjukkan pencapaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran. Capaian kinerja dari indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran telah memenuhi target dengan pemanfaatan anggaran yang optimal. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan berbagai macam kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.



Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal	Indeks Kepuasan layanan TI	100,06	94,17
Tersedianya <i>platform</i> data <i>hub</i> yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan SDI (Stakeholder Satisfaction)	Jumlah koleksi data yang dipertukarkan dengan Kementrian/Lembaga lain	100,00	99,17
Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam kerangka transformasi <i>digital</i> (Internal Process)	Persentase keselarasan strategi bisnis dan TI	100,00	84,50
	Persentase pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir	100,00	
<b>Rata-Rata Sasaran</b>		<b>100,02</b>	<b>97,40</b>

### 3.3.3. Upaya Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan salah satu tolok ukur dalam penerapan *good governance*. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, birokrasi yang efektif menjadi salah satu sasaran dan reformasi birokrasi. Salah satu efisiensi yang dapat dilakukan instansi pemerintah adalah efisiensi dalam penggunaan anggaran. Bahkan, Kementerian PAN-RB menjadikan efisiensi dalam penggunaan anggaran sebagai dasar evaluasi implementasi SAKIP di seluruh instansi pemerintah.

Secara sederhana, efisiensi dapat dirumuskan dengan proporsi antara output yang dihasilkan dengan input yang diperoleh. Dalam hal ini, output yang dihasilkan adalah capaian kinerja dari Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Sedangkan, input adalah persentase penyerapan anggaran di Deputi Bidang MIS. Rumusnya sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Capaian\ Kinerja}{Persentase\ Realisasi\ Anggaran} \times 100\%$$

Efisiensi pada Deputi Bidang MIS ditampilkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 9. Efisiensi Anggaran Tahun 2023**

Direktorat	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMSS	2.600.737.000	2.497.882.059	96,05	101,76	104,75
DDS (Tanpa PNBP)	1.020.643.000	933.784.893	91,49		
SIS	34.139.227.000	33.251.324.690	97,40		
<b>Sub Total</b>	<b>37.760.607.000</b>	<b>36.682.991.642</b>	<b>97,15</b>		
DDS (PNBP)	7.904.988.000	3.679.584.078	46,55		
<b>Total</b>	<b>45.665.595.000</b>	<b>40.362.575.720</b>	<b>88,39</b>	<b>115,13</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik melakukan efisiensi anggaran yang baik. Hal ini terlihat dari penyerapan anggaran yang tidak 100 persen tetapi dapat mencapai kinerja lebih dari 100 persen. Efisiensi ini tidak lepas dari upaya penghematan anggaran yang dilakukan. Berbagai upaya dilakukan oleh direktorat di Deputi Bidang MIS, diantaranya:

1. Negosiasi nilai kontrak pada sebagian besar kegiatan pengadaan di Direktorat SIS.
2. Pelaksanaan Pelatihan dan workshop diselenggarakan secara online. Hal ini dapat mengurangi biaya akomodasi peserta pelatihan dan workshop.
3. Pemanfaatan infrastruktur TI di Pusat Data Nasional untuk penyediaan layanan TI kepada pengguna.
4. Pengembangan beberapa sistem dan aplikasi dilaksanakan sepenuhnya dengan sumber daya internal BPS, dari analisis sistem sampai tim pengembang aplikasinya. Kegiatan ini melibatkan 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat PMSS dan Direktorat Sistem Informasi Statistik.
5. Pengembangan aplikasi wilkerstat berbasis android, sistem layanan Geoportal API, aplikasi Dashboard WebGIS administrator menggunakan *software* tidak berbayar (*open source*). *Developer* aplikasi tersebut berasal dari Direktorat PMSS. Hal ini meniadakan biaya pengadaan *software*.
6. Pemanfaatan layanan konsultasi klasifikasi statistik berbasis web (online) yang terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) dikelola bersama antara Direktorat PMSS dan Direktorat Diseminasi Statistik sehingga lebih efisien dalam komunikasi dan mudah diakses oleh pengguna secara satu pintu.
7. Laporan Klasifikasi Baku Klasifikasi Komoditas (KBKI) Pertanian masih menggunakan media zoom sehingga dapat menghemat pengeluaran anggaran terkait pembiayaan rapat biasa dengan tim Neraca dan tim ST2023, walaupun hanya beberapa kali di awal tahun 2023.
8. Pengelolaan dan penyimpanan dokumen secara digital pada penyimpanan BPS.
9. Melakukan efisiensi pada sisi sumber daya energi. Dari sisi sumber daya energi, Deputi Bidang MIS berupaya untuk hemat energi listrik dan air. Upaya penghematan energi dengan cara mematikan lampu ruang yang tidak diperlukan serta mematikan komputer/laptop ketika sedang istirahat, sedangkan untuk penghematan air yaitu ketika sedang membersihkan tangan, menggosok gigi, atau ketika sedang mencuci piring kran tidak dibiarkan terbuka sehingga air mengalir dan tidak terpakai.



4

Penutup



## 4.1 Kesimpulan

Pelaporan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik merupakan perwujudan kewajiban Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran. Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan juga merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Pencapaian Visi Deputy Bidang MIS yaitu “Penyedia Metodologi dan Informasi Statistik berkualitas untuk Mendukung Indonesia Maju” untuk mendukung visi BPS “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”, dicerminkan dari keberhasilannya mengembangkan metodologi dan sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas, membina K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik, meningkatkan layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional, dan membangun SDM yang kompeten untuk mendukung Sistem Statistik Nasional.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menunjukkan keberhasilan dari tahun sebelumnya. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 101,76 persen selama tahun 2023.

Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik sudah sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta agar mampu memenuhi misi BPS.

## 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Badan Pusat Statistik selanjutnya adalah:

### 1. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

- a. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai media dan metode pembelajaran, misalnya secara *online*, forum diskusi, *knowledge sharing* antar-pegawai di dalam unit kerja serta mengoptimalkan pengaturan beban tugas yang seimbang dari segi volume, waktu, kemampuan SDM, dan jumlah SDM.
- b. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait di internal BPS dan peningkatan manajemen/tata kelola kegiatan dalam pelaksanaan desain sensus dan survei serta pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi, agar keseimbangan antara beban tugas, waktu, dan sumber daya yang tersedia tetap terjaga, dan tujuan tercapai.
- c. Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini secara optimal sangat dibutuhkan terutama teknologi *Geographical Information System (GIS)* dan *Remote Sensing (RS)* untuk kegiatan pengembangan kerangka sampel, kerangka geospasial tutupan lahan pertanian, *updating*, dan pengumpulan data kegiatan sensus dan survei. Pengembangan sistem aplikasi berbasis GIS juga perlu

- ditingkatkan untuk memudahkan proses pengumpulan data lapangan dan pengerjaan peta digital agar lebih efisien, akurat, dan tepat guna.
- d. Penguatan statistik sektoral khususnya terkait pembinaan dan sosialisasi Satu Data Indonesia baru bisa dilakukan sampai ke daerah di tahun berikutnya.
  - e. Implementasikan manajemen perubahan dan manajemen risiko diterapkan sejalan dengan usaha peningkatan nilai SPIP secara lebih detail.

## 2. Direktorat Diseminasi Statistik

- a. Melaksanakan evaluasi, mempertajam pembagian tugas dan identifikasi kegiatan saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) sehingga lebih meningkatkan koordinasi dan komitmen dari semua pihak (*subject matter* dan Kementerian/Lembaga) dalam rangka percepatan penyediaan data pada SIMDASI untuk keperluan rilis publikasi Statistik Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA) tahun berikutnya.
- b. Melaksanakan sosialisasi standar pelayanan tentang prosedur pengajuan permintaan layanan kepada masyarakat dan *stakeholder*.
- c. Melaksanakan sosialisasi standar pelayanan tentang prosedur pengajuan permintaan layanan layanan nol rupiah kepada *Subject Matter* di internal BPS dan Kementerian/Lembaga.
- d. Menyelenggarakan pelayanan prima secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan produk statistik, layanan produk statistik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.
- e. Mengembangkan dan memelihara sistem layanan pelayanan publik.
- f. Berinovasi dalam meningkatkan kemudahan persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur/alur pelayanan, kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan, kesesuaian biaya pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, kenyamanan sarana dan prasarana, kemudahan akses data BPS, respon petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, keberadaan fasilitas pengaduan, dan proses penanganan pengaduan.
- g. Penguatan SDM internal BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik untuk mendorong pengajuan rekomendasi kegiatan statistik.
- h. Meningkatkan kolaborasi dan memaksimalkan sarana dalam proses penyelenggaraan pembinaan statistik ke K/L/D/I agar menumbuhkan kesadaran akan kewajiban K/L/D/I dalam pengajuan rekomendasi kegiatan statistik.
- i. Optimalisasi setiap pertemuan/koordinasi *Subject Matter* internal BPS dengan K/L/D/I untuk meningkatkan pembinaan statistik ke K/L/D/I.
- j. Penguatan Implementasi Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
- k. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam penyusunan metadata sektoral dan khusus.
- l. Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan aplikasi pengelolaan metadata statistik pada Sistem Indonesia Data Hub (INDAH).
- m. Meningkatkan kolaborasi Direktorat Diseminasi Statistik dengan *Subject Matter* BPS sebagai pembina data statistik dalam melakukan pembinaan statistik sektoral.

- n. Meningkatkan perencanaan anggaran pada proses pembinaan sektoral secara menyeluruh dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- o. Melakukan optimalisasi strategi promosi digital melalui berbagai akun media sosial resmi BPS sebagai solusi promosi statistik di era digital.
- p. Melakukan pembinaan terhadap SDM, baik dari pihak BPS daerah maupun universitas, dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan statistik pada akademisi melalui kegiatan Pojok Statistik di seluruh Indonesia.

### **3. Direktorat Sistem Informasi Statistik**

- a. Meningkatkan tata kelola dan tata laksana TI untuk mendukung kegiatan operasional statistik.
- b. Meningkatkan tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM di bidang TI, secara bertahap dengan menyertakan SDM mengikuti pelatihan-pelatihan dan kegiatan capacity building lainnya.
- c. HaloSIS sebagai aplikasi pemenuhan layanan TI telah dikembangkan dan dikaji layanannya mengikuti framework ITSM seperti manajemen aset, manajemen proyek dan lain-lain. Namun, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses assignment tiket maka perlu adanya knowledge transfer terkait katalog layanan yang terdapat dalam layanan TI BPS kepada pengguna layanan maupun petugas service desk.
- d. Di Awal tahun 2024 akan terjadi perubahan Tim Manajemen Layanan TI baik, sehingga perlu dilakukan knowledge transfer kepada tim kerja Manajemen Layanan TI baru agar kualitas dan layanan TI dapat meningkat sesuai target Indeks Kepuasan Layanan TI 2024.
- e. Dalam rangka pertukaran data ekspor-impor dengan Dirjen Bea & Cukai, perlu dilakukan reengineering sistem pengolahan data ekspor-impor untuk mengintegrasikan proses-proses penarikan data yang masih dilakukan di luar sistem, sekaligus untuk mengakomodir kebutuhan penarikan data ekspor impor yang semakin besar (bersifat harian).
- f. Sosialisasi pengukuran keselarasan strategi bisnis dan TI pada unit kerja lain.
- g. Memperkuat integrasi antar sistem dan menyusun mekanisme pemantauannya. Mengingat kegiatan pengembangan TI BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir membutuhkan integrasi yang baik antar sistem dan pemantauan secara ketat. Ketika ada sistem tertentu yang mengalami kendala, maka akan berpengaruh ke sistem yang lain.
- h. Percepatan pengembangan SISNAS dan proses migrasi ke PDN.
- i. Perlu dilakukan peremajaan infrastruktur TI yang telah memasuki masa end of support (server, storage, perangkat jaringan, dan lainnya) sehingga dapat menjamin keberlangsungan pemberian layanan TI kepada pengguna.





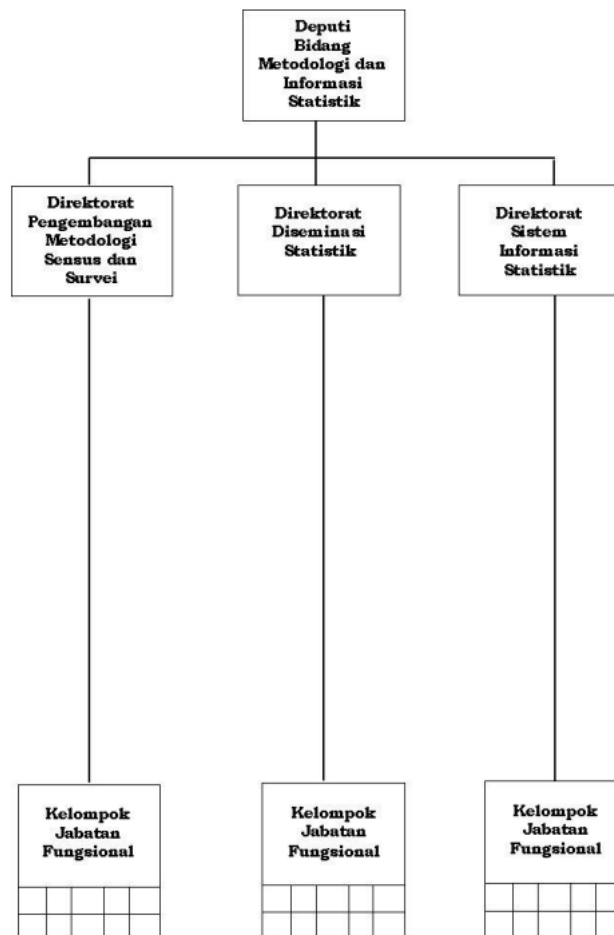
The background is a vibrant blue with a pattern of fine, parallel white lines. Overlaid on this are several large, semi-transparent geometric shapes in shades of orange and teal. There are also smaller decorative elements like clusters of orange dots and thin orange lines.

# Lampiran



## Lampiran 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

### STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020



## Lampiran 2. Penetapan Kinerja Tahunan Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik, 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Indikator Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1. Tersedianya Metodologi dan Sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas</p> <p>1.1. Tersedianya metodologi Sensus dan Survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas</p>	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	Persen	100	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Publikasi/ Dokumen/ Laporan Koordinasi terkait Metodologi dan Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei
<p>1.2. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, sistem terintegrasi, dan jaringan komunikasi yang andal</p>	Indeks Kepuasan Layanan TI	Poin	95	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	Dokumen/ Laporan Koordinasi terkait Pengembangan Sistem Informasi Statistik
<p>2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik</p> <p>2.1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)</p>	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	100	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	Publikasi/ Dokumen/ Laporan koordinasi terkait Diseminasi Statistik

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Indikator Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) 3.1. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Poin	83	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	Publikasi/ Dokumen/ Laporan koordinasi terkait Diseminasi Statistik

### Lampiran 3. Capaian Kinerja Tahunan Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik, 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tersedianya Metodologi dan Sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas 1.1. Tersedianya metodologi Sensus dan Survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	Persen	100	100,00	100,00	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Rp2.600.737.000,00
1.2. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, sistem terintegrasi, dan jaringan komunikasi yang andal	Indeks Kepuasan Layanan TI	Poin	95	95,06	100,06	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Rp34.139.227.000,00
2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik 2.1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	100	100	100,00	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Rp8.925.631,000,00
3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) 3.1. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Poin	83	88,78	106,96	

#### Lampiran 4. Capaian Kinerja Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik Tahun 2020-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)			
		2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Tersedianya Metodologi dan Sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas 1.1. Tersedianya metodologi Sensus dan Survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	131,24	100,00	100,00	100,00
1.2. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, sistem terintegrasi, dan jaringan komunikasi yang andal	Indeks Kepuasan Layanan TI	100,00	106,00	103,00	100,06
2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik 2.1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	133,33	120,00	120,00	100,00
	Jumlah sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I	71,43			
3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) 3.1. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	113,01	103,95	108,00	106,96
<b>Rata-rata capaian kinerja DBMIS</b>		<b>109,80</b>	<b>105,98</b>	<b>107,75</b>	<b>101,76</b>

**Lampiran 5. Jumlah Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik Menurut Info Kerja Dan Jenjang Pendidikan, 2023**

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1/ DIV	DI/DII/DIII	SLTA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
1.	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	1	-	-	-	-	1
2.	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	4	28	36	3	2	73
3.	Direktorat Diseminasi Statistik	-	32	48	3	2	85
4.	Direktorat Sistem Informasi Statistik	3	61	105	1	8	178
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>121</b>	<b>189</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>337</b>



# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**



**BADAN PUSAT STATISTIK**

*Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710*

*Telp: 021 3841195, 3842508, 3810291, Faks: 021 3857046*

*Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)*